

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI LAHAN KERING BALI UTARA MELALUI INTEGRASI TANAMAN DAN TERNAK SAPI

I Nyoman Adijaya, Suprpto, I Made Rai Yasa dan Putu Suratmini

Masing-masing sebagai Peneliti pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali

ABSTRAK

Pengkajian pemberdayaan masyarakat miskin di lahan kering Bali utara melalui integrasi tanaman dan ternak sapi telah dilakukan BPTP Bali di Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali mulai tahun 1998/1999 sampai saat ini. Pengkajian terdiri dari beberapa tahapan litkaji yaitu uji adaptasi, sistem usahatani (SUT) dan sistem usaha pertanian (SUP). Pengkajian bertujuan untuk meningkatkan produktivitas lahan melalui pendekatan peningkatan produktivitas, peningkatan efisiensi, peningkatan nilai tambah, peran kelembagaan serta pertanian berkelanjutan dengan mengoptimalkan sumberdaya lokal. Hasil pengkajian menunjukkan dengan penerapan teknologi introduksi produktivitas dapat ditingkatkan, ditandai dengan meningkatnya produksi tanaman jagung dari 2,0-2,5 ton/ha menjadi 4,5-5,0 ton/ha, kacang tanah dari 650 kg/ha menjadi 900-1000 kg/ha dan intensitas tanam meningkat dari 1,1 menjadi 1,46. Selain itu pemanfaatan air embung memberikan kontribusi pendapatan yang cukup tinggi untuk dimanfaatkan pada musim kemarau dengan tanaman hortikultura. Pola integrasi tanaman dan ternak sapi dengan memanfaatkan hasil sampingan keduanya dapat dimanfaatkan kembali dalam proses produksi sehingga menekan pemakaian input luar (efisiensi). Hasil *farm record keeping* yang dilakukan tahun 2003 menunjukkan pendapatan nominal petani meningkat dari Rp 2.012.422 tahun 1999 menjadi Rp 7.396.578,- sedangkan petani dampak meningkat menjadi Rp 4.600.000. Hal ini menunjukkan introduksi pola usahatani integrasi tanaman dan ternak sapi pada lahan kering dengan sentuhan teknologi intensif mampu meningkatkan produktivitas lahan dan pendapatan petani.

Kata kunci : Pemberdayaan, masyarakat miskin, lahan kering, integrasi tanaman dan ternak sapi

PENDAHULUAN

Beras merupakan sumber pangan utama di Indonesia, termasuk di Bali. Kebutuhan pangan (beras) terus meningkat sesuai pertambahan penduduk. Ironisnya lahan subur (sawah) makin menyusut karena beralih fungsi untuk industri, perumahan, jalan dan bangunan lain (Statistik Pertanian Propinsi Bali, 1999). Untuk memenuhi kebutuhan pangan tersebut, lahan kering merupakan salah satu alternatif sumberdaya yang prospektif.

Propinsi Bali memiliki potensi lahan kering yang cukup besar, tiga kali luas lahan sawah (\pm 200.000 ha) dan ditempatkan sebagai prioritas kedua dalam pembangunan pertanian di Bali. Selama ini lahan kering belum terkelola secara optimal sehingga produktivitasnya tetap rendah. Hal ini disebabkan oleh faktor sumberdaya alam (iklim, tanah, air, topografi dan lain-lain) dan sumberdaya manusia yang kurang mendukung. Sebagian besar lahan kering di Bali terletak di bagian Utara dan Timur Pulau Bali. Lahan kering bagian Utara seluas 43.333 ha (31,5% dari luas Kabupaten Buleleng) tergolong lahan kering tipe D4 dengan bulan basah 3-4 bulan dan curah hujan berkisar 1200 – 1600 mm/tahun (Suprpto dkk., 2000; Suprpto dkk., 2001).

Keterbatasan yang dimiliki lahan kering cenderung membuat kegiatan pola usahatani bersifat subsisten (tradisional). Pola usahatani tanaman semusim yang biasanya dilakukan di lahan kering adalah pola usahatani tanaman pangan seperti jagung, kacang tanah dan jenis palawija lainnya. Pola usahatani tanaman pangan dilakukan pada musim penghujan menggunakan teknologi sederhana dengan varietas lokal sehingga hasilnya rendah. Selain itu pemeliharaan ternak (umumnya sapi) masih tradisional sehingga produktivitasnya rendah (Suprpto dkk., 1999).

Wilayah litkaji di Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng termasuk lahan kering dengan topografi dataran rendah, kesuburan tanah rendah, struktur lempung berpasir dengan 3-4 bulan basah dan curah hujan berkisar 1200-1600/tahun. Sebelum dilaksanakan litkaji oleh BPTP Bali di Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng, pola usahatani petani umumnya masih tradisional. Dalam setahun petani menanam tanaman pangan (jagung, kacang tanah atau ketela pohon) hanya sekali pada musim hujan (MH) menggunakan varietas lokal dan tanpa pemeliharaan yang intensif, sehingga produksinya rendah yaitu jagung \pm 2,5 ton/ha dan kacang tanah \pm 650 kg/ha. Demikian pula untuk pengairan tanaman petani hanya memanfaatkan curah hujan saja. Air dari sumber air hutan yang

dimiliki belum terkelola dengan baik dan hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Hasil *Farm Record Keeping* (FRK) menunjukkan bahwa pendapatan petani masih sangat rendah yaitu Rp 2.014.000/KK/tahun (Suprpto dkk., 1999).

Pemeliharaan ternak sapi belum memperhatikan aspek pakan (ketersediaan hijauan), perkandangan berpindah, kesehatan hewan dan reproduksi masih menggunakan kawin alami dengan pemeliharaan ternak berkisar 2-3 ekor/KK. Pada musim kemarau (MK) biasanya terjadi pakeklik pangan sehingga banyak petani yang menjual ternak sapinya untuk membeli kebutuhan pangan (jagung), selain juga diakibatkan pada MK terjadi kekurangan pakan ternak/hijauan (Suprpto dkk., 2000).

METODOLOGI

Tulisan ini merupakan rangkuman/review pengkajian lahan kering yang dilakukan BPTP Bali di lahan kering Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng Bali dari tahun 1998 sampai dengan 2003. Pelaksanaan pengkajian terdiri dari beberapa tahapan seperti uji adaptasi yang dilanjutkan pengkajian sistem usahatani. Paket teknologi anjuran berupa komponen teknologi hasil penelitian dan pengalaman di lahan kering lain (Tabel 1). Pelaksanaan litkaji pada uji adaptasi melibatkan 5 petani koperator dengan luasan \pm 5 hektar.

Tabel 1. Paket teknologi tanaman pangan (jagung dan kacang tanah) pada pertanaman monokultur dan tumpangsari, Gerokgak 1998/99

Tanaman	Jarak tanam (cm)	Dosis pupuk (kg/ha)			Pemberian pupuk
		Urea	SP-36	KCl	
Jagung	75 x 40	250	75	75	1/3 bagian Urea, SP-36 dan KCl saat tanam, 1/3 Urea umur 21 dan 35 hst
Kacang tanah	40 x 20	50	50	50	Saat tanam

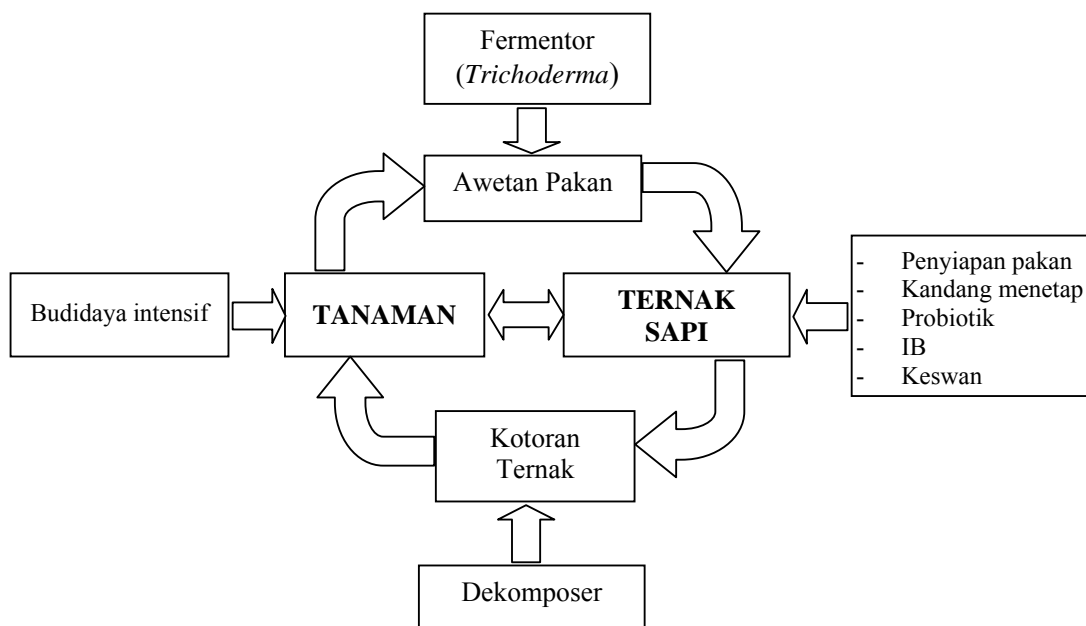
Sumber: Suprpto, dkk., 1999.

Tahun 1999 hasil uji adaptasi disebarluaskan ke Kelompok Tani Abdi Pertiwi dengan jumlah petani koperator 25 orang dan luasan \pm 25 hektar. Pada awal pelaksanaan dilaksanakan PRA (*Participatory Rural Appraisal*) sehingga dapat diketahui kendala dan potensi wilayah dan tahun 2000 teknologi introduksi disebarluaskan ke Kelompok Tirta Nadi Desa Patas (30 orang) sehingga jumlah petani koperator menjadi 55 orang dengan luas areal \pm 75 ha. Sampai tahun 2003 model ini dikembangkan ke kelompok Bhudi Kerti Desa Sumberkima dan kelompok Tani Bumi Asih Desa Pejarakan. Sampai tahun 2003 jumlah petani koperator berkembang menjadi 150 orang dengan luasan \pm 200 hektar. Perbaikan paket teknologi introduksi tanaman pangan dan sayuran dengan pemanfaatan sumberdaya lokal (pupuk kandang sapi) seperti terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Paket teknologi introduksi tanaman pangan dan sayuran

Tanaman	Jarak tanam (cm)	Dosis pupuk/ha	Pemberian
Jagung	75 x 40 (monokultur), 200 x 40 (tumpangsari)	200 kg Urea, 50 kg SP-36, 50 kg KCl, 5-10 ton pukan	Saat tanam, 21 hst, dan 35 hst
Kacang tanah	40 x 20	50 kg Urea, 50 kg SP-36, 50 kg KCl, 5-10 ton pukan	Saat tanam
K panjang	40 x 20	50 kg Urea, 50 kg SP-36, 50 kg KCl, 5-10 ton pukan	Saat tanam
Bawang merah/bawang putih	20 x 10	200 kg Urea, 300 kg SP-36, 200 kg KCl, 10-10 ton pukan	Saat tanam, 28 hst
Semangka	300 x 100	200 kg Urea, 150 kg SP-36, 200 kg KCl, 10-10 ton pukan	Saat tanam, 14 hst, 28 hst, dan 36 hst

Pada ternak sapi aspek pakan, perkandangan, penggunaan probiotik serta kesehatan ternak diperkenalkan untuk meningkatkan daya dukung dan produktivitasnya. Selain itu pengolahan limbah tanaman dan ternak untuk dikembalikan lagi dalam siklus produksi menunjukkan adanya integrasi antara keduanya (Gambar 1).



Gambar 1. Perbaikan Teknologi Pada Model Integrasi Tanaman dan Ternak Sapi di Kecamatan Gerokgak, Kabpuaten Buleleng, Bali

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Adaptasi Paket Teknologi Tanaman Pangan

Berdasarkan permasalahan yang dijumpai pada lahan kering di Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, BPTP Bali mulai tahun 1998/99 melakukan uji adaptasi paket teknologi tanaman pangan. Pengkajian melibatkan 5 petani koperator dengan luas lahan \pm 5 ha. Pada pengkajian ini diperkenalkan paket budidaya tanaman pangan seperti jagung, kacang tanah dan tumpangsari jagung kacang tanah dengan pemanfaatan air embung.

Pada litkaji ini dicoba beberapa varietas jagung yaitu varietas Arjuna, Bisma, Hibrida CPI-1 dibandingkan cara petani yang menggunakan varietas lokal. Hasil penelitian menunjukkan produksi jagung meningkat dari 2,32 ton/ha (cara petani) menjadi 3,45 – 5,79 ton/ha dengan teknologi introduksi (Tabel 3). Diketahui pula bahwa jagung varietas Bisma memiliki torelansi terhadap kekeringan.

Tabel 3. Hasil uji beberapa varietas jagung di lahan kering Kecamatan gerokgak Buleleng tahun 1998

Varietas	Variabel		
	Persentase rebah (%)	Tinggi (cm)	Produksi (ton/ha)
Bisma	9,87 b	210,7 a	5,42 ab
CPI-1	7,82 b	213,9 a	5,79 a
Arjuna	10,32 b	216,2 a	5,02 b
Lokal (introduksi)	23,04 a	215,4 a	3,45 c
Lokal (petani)	25,13 a	217,6 a	2,32 d

Sumber : Data Primer, diolah

Demikian juga pada pertanaman kacang tanah monokultur hasil dapat ditingkatkan dari \pm 650 kg/ha dengan teknologi petani menjadi 980 – 1020 kg/ha dengan teknologi introduksi (Tabel 4). Terlihat penggunaan varietas unggul Kijang dan Kelinci dapat meningkatkan produksi kacang tanah secara nyata dibandingkan dengan penggunaan varietas lokal.

Tabel 4. Hasil kacang tanah dengan introduksi teknologi di Kecamatan Gerokgak tahun 1998

Varietas	Variabel	
	Tinggi (cm)	Produksi (kg/ha)
Kijang	57,20 ab	980 a
Kelinci	54,60 b	1020 a
Lokal	63,20 a	650 b

Sumber : Data Primer, diolah

PRA (Participatory Rural Appraisal)

Pada tahun 1999 pengkajian diarahkan pada kajian sistem usahatani tanaman pangan yang melibatkan Kelompok Tani Abdi Pertiwi sebagai petani koperator dengan anggota 25 orang pada luasan \pm 25 ha. Pada awal pengkajian PRA untuk mengetahui potensi dan kendala yang dihadapi petani, sehingga bisa ditetapkan prioritas utama dan tahapan yang harus ditangani. Hasil PRA menunjukkan komoditas utama petani yaitu jagung dan ternak sapi memberikan kontribusi pendapatan kurang lebih 80%, sehingga komoditas tersebut dijadikan fokus kajian. Hasil PRA (rangking masalah) seperti Tabel 5.

Tabel 5. Rangking masalah di Kelompok Tani Abdi Pertiwi, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng Bali

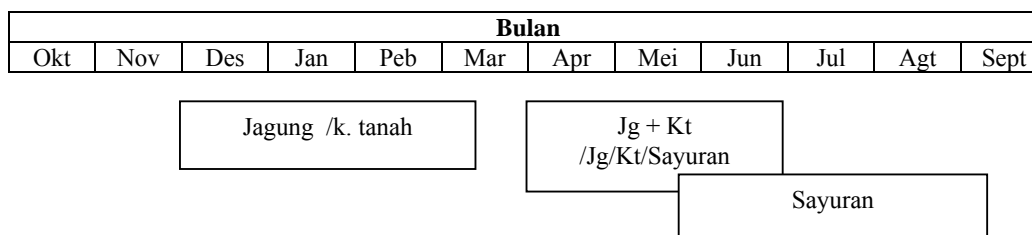
No	Jagung		Sapi	
	Masalah	Rangking	Masalah	Rangking
1	Kekeringan	I	Bibit	II
2	Busuk batang	III	Pakan	I
3	Modal	II	Kandang	III
4	Angin/rebah	IV	Reproduksi	IV

Sumber: Suprpto, dkk., 1990

Pada pelaksanaan PRA dijumpai ada potensi sumber air yang belum terkelola dengan optimal sehingga bisa dikembangkan pada pelaksanaan pengkajian.

Pembuatan Cubang/Tandon Air dan Perbaikan Pola tanam

Setelah pelaksanaan PRA diperkenalkan pembuatan cubang/tandon air baru pada elevasi tertinggi dari lahan petani yang dimanfaatkan untuk menampung air minum petani yang tidak terkelola dengan optimal sehingga bisa dimanfaatkan untuk pertanaman pada musim kemarau. Dengan adanya embung diperkenalkan teknologi pola tanam introduksi dengan penerapan teknologi budidaya tanaman intensif seperti berikut:



Gambar 2. Pola tanam introduksi dengan pemanfaatan air dari cubang/tandon air

Teknologi hasil uji adaptasi dari tahun sebelumnya diterapkan pada tanaman pangan (jagung dan kacang tanah) di tingkat petani meningkatnya produksi jagung petani yang menggunakan varietas

lokal (Lokal Seraya) dari 2,0 – 2,5 ton/ha menjadi 4,5 – 5,5 ton/ha, atau meningkat \pm 125%. Selain itu intensitas tanam mulai dapat ditingkatkan dengan pemanfaatan air embung pada musim kemarau untuk tanaman pangan (jagung dan kacang tanah). Pada musim kemarau tahun tersebut juga dicoba pemanfaatan air embung untuk tanaman bawang merah, kacang panjang dan semangka pada beberapa petani dengan memanfaatkan air embung. Komoditas tersebut memberikan produksi rata-rata bawang merah 85-90 kg/100m², kacang panjang 80-85 kg/100m² dan semangka 200 – 230 kg/100m². Luas pertanaman pada MK berkisar 100 m² – 400 m² untuk setiap jenis tanaman yang dibudidayakan.

Integrasi Tanaman dan Ternak

Model integrasi tanaman dan ternak sapi diperkenalkan mulai tahun 2000 dengan introduksi teknologi pemanfaatan limbah tanaman untuk pakan ternak serta pemakaian limbah ternak ke pertanaman. Pada tahun ini juga diintroduksi pemeliharaan ternak sapi secara intensif. Sebagai langkah awal diintroduksi penanaman rumput raja dan gamal di pematang petakan lahan petani untuk menambah penyediaan hijauan pakan ternak selain itu juga diperkenalkan perkandangan menetap. Selanjutnya juga diintroduksi pemanfaatan air embung untuk pertanaman sayuran (bawang merah, semangka, kacang panjang dan bawang putih) yang memiliki nilai ekonomis tinggi dibandingkan penggunaan tanaman pangan pada MK.

Hasil pengkajian ini menunjukkan bahwa dengan penerapan teknologi introduksi produksi jagung rata-rata di atas 4,5 ton/ha, kacang tanah rata-rata di atas 900 kg/ha, sedangkan kacang panjang memberikan produksi antara 82,5 – 85 kg/100 m², bawang merah 87,5 – 92 kg/100 m² dan semangka 200 – 230 kg/100m².

Pengolahan limbah pertanian menjadi awetan pakan ternak diintroduksi di Kelompok tani Abdi Pertiwi dan Tirta Nadi dengan penggunaan fermentor *Trichoderma sp.* untuk pakan ternak pada MK. Sedangkan dengan semakin meningkatnya penggunaan air embung untuk pertanaman pada MK diperkenalkan pengolahan limbah ternak menjadi pupuk organik dengan dekomposer *Rummino bacillus* dan cacing tanah (*Lumbricus rubellus*), sehingga mencerminkan suatu siklus yang saling terkait antara tanaman dan ternak sapi.

Pada tahun 2002 model pola tanam ini dikembangkan ke Kelompok Budhi Kerti Desa Sumberkima dengan jumlah petani koperator 67 orang, sehingga total petani koperator menjadi 112 orang. Pada tahun 2003 dikembangkan ke Kelompok Tani Bumi Asih Desa Pejarakan dengan jumlah anggota 30 orang. Hasil litkaji menunjukkan di Kelompok Budhi Kerti penerapan pertanaman jagung dan kacang tanah baik secara monokultur maupun tumpangsari mampu meningkatkan produksi jagung dari 3,5 ton/ha menjadi di atas 4,5 ton/ha dan kacang tanah meningkat dari 0,90 kg/ha menjadi 1,20 ton/ha. Di Kelompok Tani Bumi Asih pemanfaatan air embung pada MK mampu memberikan produksi bawang merah berkisar 90-120 kg per 100m². Petani umumnya mengusahakan pada lahan dengan kisaran luasan 100-200 m². Sumartini dkk., (2003) mendapatkan selama empat tahun pengkajian di kelompok tani Abdi Pertiwi dan Tirta Nadi dengan penerapan pola tanam introduksi intensitas tanam meningkat dari 1,1 menjadi 1,46.

Kelembagaan

Peran lembaga (kelompok tani) di dalam adopsi teknologi sangat penting. Kelompok berperan sebagai wahana belajar, kerjasama dan bisa berkembang menjadi unit usaha. Pada pelaksanaan litkaji di lahan kering Kecamatan Gerokgak, Buleleng kelompok tani sangat berperan dalam memudahkan transfer teknologi. Selain itu adanya pengkajian BPTP Bali juga meningkatkan kesadaran berkelompok petani di lahan kering yang ditandai dengan semakin banyaknya tumbuh kelompok-kelompok tani baru serta adanya pertemuan secara kontinyu. Tahun 2003 pelaksanaan litkaji masuk tahun ke lima, dimana telah terbentuk koperasi di Kelompok Tani Abdi Pertiwi sebagai wadah dalam penyiapan agro input. Pembentukan koperasi atas inisiatif anggota kelompok tani, yang bergerak di bidang penyiapan sarana produksi dan simpan pinjam. Dengan adanya wadah koperasi ini diharapkan kelompok dapat menyediakan sarana/prasarana yang digunakan oleh petani terkait dengan introduksi teknologi oleh BPTP Bali, sehingga selain sebagai wadah unit usaha, koperasi diharapkan sebagai inkubator teknologi. Jumlah aset yang dimiliki berupa 1 bangunan dengan nilai Rp 25.000.000,- dan modal usaha Rp 16.000.000,-. Pada pembuatan bangunan BPTP Bali membantu dana sebesar Rp 2.500.000,- sedangkan sisanya merupakan swadaya petani.

FRK (Farm Record Keeping)

Farm record keeping dilakukan setiap akhir tahun pengkajian untuk mengetahui perkembangan pendapatan petani. Pendapatan petani diperoleh dari kegiatan usahatani (farm), luar usahatani (non farm) dan off farm. Farm record keeping yang dilakukan sampai tahun 2003 pada kelompok tani Abdi Pertiwi dan Tirta Nadi menunjukkan adanya peningkatan pendapatan petani setiap tahunnya (Tabel 6).

Tabel 6. Pendapatan petani koperator di kelompok tani Abdi Pertiwi dan Tirta Nadi kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng Bali

Kelompok Tani	Tahun				
	1999	2000	2001	2002	2003
Abdi Pertiwi	2.012.422	4.407.204	5.717.635	6.014.290	7.396.578
Tirta Nadi	-	3.300.000	4.479.097	5.336.925	5.493.025

Sumber : Sumartini, dkk., 2003

Sumartini dkk., (2003) pada kegiatan studi dampak pengkajian sistem usahatani di lahan kering mendapatkan pendapatan petani Abdi Pertiwi tahun 2003 yaitu Rp 7.783.513,- dan di kelompok tani Tirta nadi Rp 5.408.185,-. Pendapatan ini lebih tinggi dibandingkan petani non koperator pembeding Abdi Pertiwi yaitu Rp 4.993.808,- dan pembeding Tirta Nadi yaitu Rp 4.258.431,-. Selain itu juga diperoleh sektor pertanian memberikan kontribusi berkisar antara 85-85% dari total pendapatan rumah tangga.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pengkajian yang dilakukan BPTP Bali di lahan kering Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng berdampak terhadap :

1. Peningkatan jumlah embung/tandon air yang dapat dilihat dari meningkatnya jumlah embung di kelompok Abdi Pertiwi dari 6 buah pada menjadi 28 buah dan di Tirta Nadi dari 6 buah menjadi 30 buah.
2. Produksi tanaman pangan seperti jagung meningkat dari 2,0-2,5 ton/ha menjadi 4,5-5,5 ton/ha, kacang tanah dari 650 kg/ha menjadi >900kg/ha. Pada MK air embung dimanfaatkan untuk tanaman sayuran seperti bawang merah, kacang panjang, semangka dan bawang putih.
3. Dengan semakin meningkatnya ketersediaan pakan ternak dan diperkenalkannya pembuatan awetan pakan ternak sampai tahun kelima pengkajian pemeliharaan ternak sapi meningkat dari 2-3 ekor/KK menjadi 4-5 ekor/KK.
4. *Farm Record Keeping* dilakukan diakhir tahun untuk mengetahui pendapatan petani baik dari *on farm*, *off farm* dan *non farm*. Sampai tahun kelima pendapatan petani per KK di Kelompok Tani Abdi Pertiwi meningkat dari Rp 2.012.422,- (tahun 1999), Rp 4.407.204 (tahun 2000), Rp 5.717.635,- (tahun 2001), Rp 6.014.290,- (tahun 2002) dan Rp 7.396.578,- (tahun 2003). Sedangkan di Kelompok Tani Tirta Nadi meningkat dari Rp 3.300.000 (tahun 2000), Rp 4.479.097,- (tahun 2001), Rp 5.336.925,- (tahun 2002) dan Rp 5.493.025,- (tahun 2003).

DAFTAR PUSTAKA

- Statistik Pertanian Propinsi Bali. 1999. Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Bali.
- Sumartini, M., I.G.A.K. Sudaritmaja, N. Adijaya, P. Suratmini, S.I. Wahyuningsih dan Suharyanto, 2003. Studi Dampak Pengkajian Sistem Usahatani di Lahan Marginal. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali.
- Suprpto, Mahaputra, dan M.A. Sinaga. 1999. Pengkajian Sistem Usahatani Tanaman Pangan di Lahan Marginal. Instalasi Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian Denpasar.
- Suprpto, N. Adijaya, M. Rai Yasa dan K. Mahaputra. 2000. Sistem Usahatani Diversifikasi Pada Lahan Marginal. Instalasi Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian Denpasar.

Suprpto, N. Adijaya, M. Rai Yasa dan K. Mahaputra. 2001. Sistem Usahatani Diversifikasi Pada Lahan Marginal. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali.

MOBILISASI PETANI MISKIN DI WILAYAH AGROEKOSISTEM MARJINAL MELALUI WAHANA KELOMPOK USAHA BERSAMA MENUJU KEMANDIRIAN

Rachmat Hendayana dan Ketut Puspadi

Peneliti, Balai Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian
Jl. Tentara Pelajar No 10 Bogor.

ABSTRAK

Mobilisasi petani miskin mengandung arti menggerakkannya ke arah yang lebih berdaya dan mandiri sehingga mampu mengatasi permasalahannya sendiri. Penelitian ini bertujuan membahas potensi, peluang dan kendala pengembangan kelompok usaha bersama oleh petani miskin di wilayah marginal sebagai wahana menuju kemandirian. Penelitian dilakukan di Provinsi NTB khususnya Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2003. Metode penelitian dilakukan melalui pendekatan pemahaman pedesaan secara partisipatif (PPSP = PRA) menggunakan *focus group discussion*. Pembahasan dilakukan secara deskriptif dan hasilnya menunjukkan : 1) Meskipun petani miskin umumnya berada di lahan kering dengan persediaan air terbatas, tetapi mereka bertahan hidup. Hal itu mengindikasikan bahwa ia memiliki potensi yang jika ditangani dengan baik dapat berkembang untuk mengatasi berbagai kendala/kelemahan yang dimilikinya. 2) Strategi pemberdayaan petani miskin ke arah yang mandiri dapat ditempuh antara lain melalui wahana kelompok usaha bersama, 3) Untuk lebih memobilisasi petani miskin ke arah yang lebih berdaya dan mandiri perlu didorong dan dimotivasi terbentuknya jaringan kelembagaan secara horizontal antara kelompok usaha yang terbentuk dengan pelaku usaha lain. Selian itu perlu juga diciptakan adanya kepemilikan kapital melalui inovasi pengembangan keuangan masyarakat.

Kata kunci: *Petani miskin, mobilisasi, kelompok usaha bersama, lahan marginal, kemandirian*

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah kondisi riil di lingkungan masyarakat sebagai wujud keberagaman. Sebagaimana dipahami bersama bahwa di dalam masyarakat kita selain memiliki kesamaan-kesamaan, juga memiliki ketidaksamaan satu sama lain. Ada orang yang dapat memelihara hidup diri dan tanggungannya dan ada yang tidak mampu melakukannya tanpa bantuan orang lain secara ekonomi. Atas dasar ketidak samaan inilah dikenal adanya konsep atau pengertian kemiskinan (*poverty*) sejak abad pertengahan (Sallatang, 1980).

Konsep kemiskinan mengandung tiga arti yaitu kemiskinan sosial (*social poverty*), *pauperisma* (*pauperism*) dan kemiskinan moral (*moral poverty*). Kemiskinan sosial mengandung arti tidak hanya ketidaksamaan yang bersifat ekonomi misalnya dalam hal pemilikan kekayaan materil atau pendapatan akan tetapi juga yang bersifat sosial seperti adanya perasaan rendah diri (*inferiority*), ketergantungan dan sebagainya. Sedangkan *pauperisma* mengandung arti tidak mempunyai kemampuan untuk memelihara dirinya sendiri tanpa bantuan dari luar atau orang lain sampai pada tingkat pemenuhan kebutuhan minimal. Mengenai kemiskinan moral bertalian dengan nilai-nilai sosial yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan.

Dari ketiga pengertian kemiskinan di atas kata kuncinya adalah ketidak mampuan. Oleh karena itu upaya mengentaskan kemiskinan memerlukan pendekatan yang bisa meningkatkan potensi yang dimiliki dapat menekan ketidakmampuannya sehingga berdaya. Petani miskin perlu di mobilisasi atau digerakkan kearah yang dapat menciptakan peluang-peluang usaha yang memberikan hasil bagi dirinya sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada pihak lain. Pertanyaannya adalah bagaimana cara memobilisasi petani miskin tersebut agar efektif dapat mendorongnya kearah kemandirian?

Penelitian ini bertujuan membahas potensi, peluang dan kendala pengembangan kelompok usaha bersama sebagai salah satu alternatif pendekatan untuk memobilisasi petani miskin di wilayah marginal menuju kemandirian. Hasil penelitian akan berguna menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait yang peduli akan kemiskinan.

METODOLOGI

Kerangka Pemikiran

Kemiskinan merupakan suatu resultante iterasi dan interaksi antara teknologi, sumberdaya alam dan kapital, sumberdaya manusia, dan kelembagaan/kebijaksanaan. Kemiskinan dapat dipandang sebagai akibat (*endogenous variable*) atau juga sebagai sebab (*exogenous variable*) dari sesuatu. Oleh karenanya dalam pembahasan masalah kemiskinan ini ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu adanya faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan sebagai masalah sosial dan dampak kemiskinan terhadap masyarakat.

Sebagai peubah endogen, kemiskinan biasanya merupakan turunan langsung pendapatan baik dalam nilai uang maupun bukan uang yang kesemuanya merupakan fungsi dari sumberdaya alam (jenis dan kapasitasnya), kapital dalam bentuk sarana dan prasarana fisik, sumberdaya manusia dalam bentuk kapasitas intelektual untuk menghasilkan sesuatu dan sikap serta nilai lainnya. Teknologi dalam bentuk hardware atau software membantu memecahkan masalah-masalah tertentu, dan kelembagaan berperan sebagai koordinator actor-aktor ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa dan juga sebagai koordinator para pelaku ekonomi dalam mendistribusikan manfaat ongkos yang diterima oleh masing-masing pelaku ekonomi.

Kemiskinan sebagai faktor eksogen akan menurunkan kapasitas dan kapabilitas manusia untuk bekerja dan berkreasi dengan lebih baik. Kemiskinan akan meningkatkan ongkos pengobatan, dan kemiskinan biasanya erat dengan penurunan mutu lingkungan.

Banyak pakar menengarai bahwa pembangunan yang tidak dikaitkan dengan masalah kemiskinan akan dapat membuka peluang munculnya permasalahan - permasalahan jangka pendek dan jangka panjang yang akan membahayakan proses pembangunan itu sendiri. Kemiskinan akan meningkatkan ongkos memelihara kesehatan, menurunkan produktivitas dan mutu sumberdaya manusia, dan yang lebih mendasar adalah kemiskinan menurunkan martabat sebagai manusia. Oleh karena itu UNDP (1990) menekankan bahwa sudah saatnya prioritas program pembangunan lebih memperhatikan taraf hidup masyarakat lapisan bawah.

Sejalan dengan amanat dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 34 yang berbunyi "fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara" pemerintah secara berkesinambungan melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Berbagai program penanggulangan kemiskinan telah dilakukan, baik berupa program jangka panjang maupun jangka pendek. Program jangka panjang lebih diarahkan pada upaya pemberdayaan masyarakat, sementara program jangka pendek yang secara masal dilaksanakan untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan minimum pada standar hidup pokok. Hendriwan (2003) telah mengidentifikasi adanya sekitar 15 (lima belas) program penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan pemerintah termasuk program jaring pengaman sosial (JPS), yakni: Program Inpres Desa Tertinggal (IDT); Program Pengembangan Kecamatan (PPK); Program Kredit Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dalam rangka Pengentasan Kemiskinan (KP-TTG- Taskin); Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP); Program Kredit Usaha Tani (KUT); Pogram Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS); Program Operasi Pasar Khusus Beras (OPK-Beras); Program Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE); Program Beasiswa dan Dana Biaya Operasional Pendidikan Dasar dan Menengah (JPS-Bidang Pendidikan); Program JPS-Bidang Kesehatan; Program Padat Karya Perkotaan (PKP); Program Prakarsa Khusus Penganggur Perempuan (PKPP); Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Pembangunan Prasarana Subsidi Bahan Bakar Minyak (PPM-PrasaranaSubsidi BBM); Program Dana Bergulir Subsidi Bahan Bakar Minyak untuk Usaha Kedi dan Menengah; Program Dana Tunai Subsidi Bahan Bakar Minyak

Berbagai hambatan ditemui dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, terutama disebabkan oleh sosialisasi yang kurang efektif baik pada anggota masyarakat yang menjadi sasaran program maupun pada pelaksana program itu sendiri. Sebagian besar program tidak mengikutsertakan secara aktif masyarakat. Sehingga banyak dijumpai kasus bahwa program yang dilaksanakan tidak tepat sasaran baik jenis kegiatan maupun kelompok targetnya.

Partisipasi aktif masyarakat dinilai turut menunjang keberhasilan program penanggulangan kemiskinan. Dalam proses berpartisipasi ini peranan kelembagaan lokal seperti pemerintahan desa dan lembaga-lembaga tradisional yang dimasyarakat sangat penting. Atas dasar Sallatang (1980)

telah menggagas inisiasi mobilisasi masyarakat pedesaan melalui kelompok-kelompok kecil di masyarakat dan pembentukan badan usaha buruh tani (BUBT). Pendekatan pengembangan kelompok ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi berbagai permasalahan dan kebutuhannya

Pendekatan pengembangan kelompok tersebut sejalan dengan akar budaya masyarakat Indonesia yang sejak dulu terbiasa bekerja berkelompok dengan bentuk yang sesuai dengan budaya dan kondisi lokal yang ada. Dari sisi masyarakat, dengan berkelompok akan lebih mudah mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan, dibandingkan dengan bekerja sendiri. Atas dasar kerangka pemikiran tersebut kiranya inisiasi pembentukan kelompok usaha bersama sebagai wahana mobilisasi penduduk miskin di lahan marginal akan dapat dilakukan.

Data dan Sumber Data

Makalah dikembangkan dari hasil penelitian yang dilakukan Balai Pengkajian dan Pengembangan Pertanian (BP2TP) Bogor bekerjasama dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTB. Penelitian dilakukan di 10 desa lokasi Poor Farmer Income Improvement through Innovation Project (PFI3P) dalam Kabupaten Lombok Timur, tahun 2003, yaitu desa Selebung Ketangga, Suangi, Montong Betok, Pringgasele, Dasan Lekong, Anjani, Korleko, Mamben Lauk, Sembalun Lawang dan Sambelia.

Pengumpulan data dilakukan melalui pendekatan pemahaman pedesaan partisipatif atau *Participatory Rural Appraisal (PRA)* menggunakan metode diskusi kelompok (*focus group discussion= FGD*) melibatkan beberapa group petani di tiap desa. Dalam setiap group beranggotakan 8 – 12 orang yang merepresentasikan lapisan masyarakat miskin di desa tersebut.

Metode Analisis

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif menggunakan beberapa parameter statistik sederhana seperti persentase, rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, frekuensi dan distribusi. Tabulasi silang dilakukan untuk menjelaskan keterkaitan antar variable yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Biofisik Wilayah Penelitian

Lombok Timur memiliki luas sekitar 160,5 ribu hektar, terbagi ke dalam 20 wilayah administrasi kecamatan. Elevasinya berada di antara 0 - 3.726 m.dpl dengan keterlerangan mulai 0 % - ≥ 40 % (datar sampai curam). Bagian terbesar wilayahnya (71,76 %) adalah lahan kering berupa hutan negara. Dalam jangka waktu dua tahun (2001 – 2002) telah terjadi alih fungsi lahan produktif berupa ladang, lahan yang sementara tidak diusahakan, hutan negara dan tambak menjadi pemukiman dan lain-lain (Tabel 1).

Tabel 1. Perubahan tata guna lahan kering di Lombok Timur, 2000 – 2002

Jenis lahan kering		Th 2000 - 2001		Th 2001 - 2002		Th 2000 - 2002	
		(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)
a.	Pekarangan	132	1.9	721	10.0	853	12.0
b.	Tegal/Kebun	-1640	-7.4	4414	21.4	2774	12.5
c.	Ladang/huma	2721	33.5	-4648	-42.8	-1927	-23.7
d.	Padang rumput	0.0	0.0	11	11.6	11	11.6
e.	Sementara tidak diusahakan	-2265	-100.0	0.0	0.0	-2265	-100.0
f.	Hutan rakyat	1237	519.7	1466	99.4	2703	1135.7
g.	Hutan negara	-1136	-1.8	-5823	-9.2	-6959	-10.8
h.	Perkebunan	4	0.6	170	25.0	174	25.7
i.	Tambak	-60	-6.9	53	6.6	-7	-0.8
j.	Kolam/empang	14	18.9	25	28.4	39	52.7
k.	Lain-lain	913	9.7	3611	35.1	4524	48.3

Sumber: Lombok Timur Dalam Angka 2002 (diolah)

Mutasi lahan terjadi juga pada lahan sawah (Tabel 2) dimana dalam kurun waktu 2 tahun areal sawah irigasi setengah teknis dan sawah yang berpengairan sederhana non PU berkurang masing-masing 3,4 % dan 39,6 % .

Tabel 2. Perubahan (mutasi) jenis sawah di kabupaten Lombok Timur, 2000 – 2002

Jenis lahan sawah	Th 2000 - 2001		Th 2001 - 2002	
	(ha)	(%)	(ha)	(%)
Irigasi teknis	2918	51.0	-802	-9.3
½ teknis	-2530	-8.0	1465	5.1
Sederhana pu	8	0.8	1058	104.4
Sederhana non pu	-383	-6.1	-2088	-35.7
Tadah hujan	-13	-1.5	367	42.6

Sumber: Lombok Timur Dalam Angka 2002 (diolah)

Menurut kondisi agroekosistemnya lokasi penelitian dibedakan atas lahan dominan lahan sawah dan dominan lahan kering dengan topografi wilayah yang umumnya datar sampai bergelombang dan berbukit pada elevasi 10 -1200 mdpl. Aksesibilitas wilayah relatif baik karena semua lokasi terhubung oleh jalan raya beraspal dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua dan roda empat. Sarana transportasi di desa dilayani ojek, cidomo dan angkutan pedesaan.

Keragaan Sosial Ekonomi

Pendapatan penduduk bersumber dari pertanian (*on farm* dan *off farm*) dan bukan pertanian (*non farm*). Meskipun demikian pemilikan lahan pertanian di sangat senjang. Pemilikan lahan hanya terkonsentrasi pada segelintir penduduk misalnya di Desa Montong Betok ada 4 orang dengan kepemilikan perorang diatas 10 ha, tapi sebagian besar tidak memiliki lahan. Kalaupun memiliki lahan luasnya relative sempit berkisar 0,01 – 0,03 ha bahkan di desa Sambelia mayoritas petani (90 %) tidak memiliki lahan (Hendayana, dkk., 2003).

Di lokasi AEZ yang dominan sawah diusahakan padi, palawija (jagung, kacang hijau), sayuran (bawang merah, cabe kecil, kacang panjang, mentimun) dan tembakau. Sedangkan di AEZ lahan kering ditanami palawija (ubi kayu), hortikultura buah-buahan (mangga, pepaya, nenas, pisang, sawo, jambu), tebu, jambu mente, kelapa, nangka, bambu dan ternak (kuda, sapi, kambing, domba, ayam buras, ayam potong, itik).

Sementara itu petani yang tidak berlahan melakukan usaha *off farm* sebagai buruh di lahan tetangga atau bahkan ke luar desa untuk mendapatkan upah. Sebagian kecil melakukan usaha *non farm* sebagai pedagang kebutuhan sehari-hari, menjadi penjahit, buruh di sektor industri, pertukangan dan jasa.

Meski usahanya beragam namun hasil yang diperoleh masih jauh dari memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya sehingga kebiasaan melakukan pinjaman untuk memenuhi kebutuhannya tetap berlangsung meskipun harus mengembalikan dengan bunga tinggi yaitu 10 - 50 % selama satu musim tanam.

Kelembagaan pendukung kegiatan ekonomi di desa seperti pasar input, pasar output, lembaga keuangan desa, dll. kondisinya beragam. Kelembagaan sosial seperti kelompok tani dan penyuluhan pertanian keadaannya sudah menurun, seiring dengan kebijakan otonomi daerah.

Anatomi Kemiskinan

Menurut data BPS (2003), proporsi penduduk miskin di NTB pada tahun 2003 secara relatif mengalami sedikit penurunan yaitu dari 27,76 % pada tahun 2002 tinggal 26,34 % pada tahun 2003. Penurunan tersebut utamanya pada penduduk fakir, sementara itu penduduk yang bukan fakir meningkat sekitar 0,07 % (Tabel 3).

Tabel 3. Perkembangan Kemiskinan Relatif di NTB, 2002 - 2003

Uraian	2002		2003	
	Jiwa	%	Jiwa	%
- Fakir	655999	15,89	576514	14,39
- Bukan Fakir	489812	11,87	478272	11,94
Jumlah Penduduk Miskin	1145811	27,76	1054786	26,34
Jumlah Penduduk	4127519	100	4005238	100

Sumber: BPS, (2003) diolah

Kemiskinan di NTB tidak hanya terjadi di pedesaan akan tetapi juga melanda masyarakat perkotaan. Data pada Tabel 4 menunjukkan jumlah penduduk miskin terbanyak malah terjadi di perkotaan, bahkan dalam satu tahun terakhir ini jumlahnya meningkat sedangkan di pedesaan menurun.

Tabel 4. Perkembangan Kemiskinan Relatif di Lombok NTB Menurut Pedesaan dan Perkotaan, 2002 - 2003

Uraian	2002	2003
Perkotaan		
- Fakir	20,31	16,04
- Bukan Fakir	13,80	18,80
Jumlah	34,10	34,64
Pedesaan		
- Fakir	13,17	13,51
- Bukan Fakir	10,68	8,35
Jumlah	23,84	21,86

Sumber: BPS, (2003) diolah

Di Lombok Timur (Lotim), selama periode lima tahun (1997 – 2001) kondisi kemiskinannya cenderung meningkat tajam terutama semenjak krisis ekonomi tahun 1997 - 1998. Meskipun secara nominal pendapatan rata-rata meningkat, akan tetapi secara riil cenderung menunjukkan penurunan. Pendapatan perkapita penduduk Lotim secara nominal meningkat dari Rp 946 ribu-an pada tahun 1997 menjadi Rp 2,062 juta pada tahun 2002, tetapi secara riil menurun dari Rp 701 ribu menjadi Rp 699 ribu per kapita di tahun 2002. Angka tersebut berada di bawah ketetapan World Bank yaitu sekitar US \$370 dalam setahun atau sekitar Rp 3,1 juta per kapita per tahun (ADB, 2003)

Faktor-faktor penyebab kemiskinan erat kaitannya dengan ciri-ciri rumah tangga itu sendiri. Siklus kemiskinan merupakan interdependensi dari berbagai karakteristik yang secara hubungan sebab akibat menyebabkan kemiskinan itu tetap eksis. Dari penelitian ini diidentifikasi beberapa ciri rumah tangga dan anggotanya sekaligus merupakan faktor yang berkaitan dan berpengaruh terhadap kemiskinan seperti pendidikan anggota rumah tangga yang rata-rata relatif rendah, tidak akses terhadap lahan, tidak akses terhadap teknologi karena lemahnya pemilikan modal, kurang memiliki akses terhadap informasi, adanya ketidak mampuan menghadapi gejolak ekonomi dan pasar sehingga menjadi objek rentenir. Ciri kemiskinan di lokasi penelitian ini tidak jauh berbeda dengan ciri kemiskinan yang dikemukakan Fagi (2002).

Penyebab kemiskinan tersebut juga sejalan dengan yang terjadi di daerah Jawa seperti yang dikemukakan Muhammad (2004). Kemiskinan di Jawa terutama disebabkan kepemilikan tanah yang terbatas, terbatasnya akses penduduk miskin terhadap fasilitas umum seperti pendidikan dan kesehatan dasar serta sumber air bersih, pencemaran lingkungan yang hebat di sungai dan laut sebagai tempat mata pencaharian penduduk. Disamping itu korupsi yang menyebabkan asset-aset yang seharusnya dimiliki publik telah berpindah tangan menjadi milik pribadi. Terjadinya konflik social dan politik serta bencana alam apalagi jika sering terjadi, juga memberikan sumbangan bagi timbulnya kemiskinan.

Inisiasi Kelompok Usaha Bersama

Meski penduduk desa berada dalam wilayah marjinal lahan kering, namun masih ada potensi diri dan lingkungan masyarakat yang sebenarnya bisa dimanfaatkan. Masalahnya karena ketidaktahuan, mereka tidak mampu menggalinya sehingga kehidupan mereka tetap miskin.

Dalam kondisi demikian, diperlukan bantuan proses penyadaran yang ditujukan bukan hanya golongan penduduk itu sendiri, melainkan juga penyadaran di antara aparat teknis yang bertugas memberikan pelayanan kepada penduduk miskin. Dalam konteks penyadaran, yang terpenting adalah penyadaran akan kemampuan diri, sumberdaya yang dimiliki, peluang baru yang bersumber dari dalam dan luar komunitas untuk memperbaiki kondisi yang ada.

Dalam upaya memberdayakan diri mereka, penguatan organisasi masyarakat melalui inisiasi kelompok usaha bersama merupakan suatu alternative yang dapat dipertimbangkan. Hal itu mengacu pada prinsip memanfaatkan potensi kelembagaan yang berakar kuat dalam struktur masyarakat lokal. Dalam konteks ini yang penting adalah organisasi dan kelembagaan kelompok usaha bersama harus berawal dari prakarsa masyarakat secara sukarela agar memudahkan mereka mengelola potensi sosial ekonomi yang dimiliki.

Menurut Sallatang (1980), orang-orang desa dapat memobilisasikan diri dalam kelompok-kelompok dan mobilisasi ini akan lebih intensif dalam kelompok-kelompok yang berskala kecil. Melalui kelompok-kelompok kecil memungkinkan terjadinya interaksi dan komunikasi langsung satu sama lain. Dalam kelompok kecil biasanya orang-orang desa relatif mudah berpartisipasi dan akan lebih efektif dengan koordinasi. Baik berpartisipasi dalam bentuk daya (tenaga kerja) dan dana (semampunya) maupun dalam ide-ide atau fikiran dalam berbagai kegiatan pembangunan. Orang-orang desa lebih mampu mengemukakan pikiran dan pendapatnya dalam rangka pencernaan ide-ide dan pelaksanaan pembangunan.

Pengembangan kelompok usaha bersama merupakan serangkaian proses kegiatan memberdayakan kumpulan anggota masyarakat yang mempunyai tujuan bersama, dimulai dari proses pengenalan akan program, berlanjut pada kajian PRA dan diperkuat ketika masyarakat merasa mereka perlu berbagi tugas dan tanggung jawab dalam melakukan kegiatan yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan yang mereka hadapi.

Peran pihak luar hanyalah sebatas mendampingi kelompok ke arah kemandirian. Sikap pendamping yang mau belajar dari masyarakat, merasa setara (*bukan guru petani*), tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, sikap bersahabat akan sangat membantu proses ini.

Proses pendampingan dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan tidak untuk selamanya, dengan mempertimbangkan berbagai hal terutama upaya kemandirian masyarakat dan kemampuan lembaga. Alangkah baiknya jika pendampingan suatu kelompok dilakukan lebih dari satu orang dan merupakan suatu tim multidisiplin sehingga bisa saling melengkapi termasuk pendamping pria dan perempuan.

Pendekatan khusus dan informal mungkin perlu dilakukan kepada mereka, karena mungkin sekian lama, mereka tersisih dari proses pembangunan yang ada di desa. Anggota-anggota yang lain juga perlu didorong untuk memikirkan bagaimana kelompok ini dapat berpartisipasi dalam pengembangan kelompok dengan segala potensi dan keterbatasan yang mereka miliki. Keputusan untuk ikut atau tidak sebagai anggota kelompok ada di tangan mereka, karena mereka perlu waktu untuk menilai apakah program ini akan membantu atau memberatkan mereka.

Aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pendekatan pengembangan kelompok adalah:

- Keanggotaan tidak terikat oleh jumlah, akan tetapi tidak terlalu banyak.
- Perlu memperhatikan keterlibatan kaum perempuan
- Berpihak pada mereka yang miskin sumberdaya, tidak berpendidikan dan 'kelompok terabaikan' lainnya.
- Orientasi kegiatan berdasarkan kebutuhan; bukan ditentukan komoditasnya oleh pihak luar
- Aspek keswadayaan tercermin dalam setiap kegiatan, termasuk pembiayaan
- Kelompok sebagai pelaku utama pengambilan keputusan
- Demokratis, terbuka / transparan
- Berwawasan lingkungan dan budaya
- Mengoptimalkan sumberdaya lokal
- Peran masyarakat semakin meningkat, peran pendamping semakin berkurang

Setelah terbentuk kelompok usaha bersama di lingkungan mereka, langkah berikutnya adalah memberdayakan kelompok tersebut sehingga bergerak dinamis. Untuk lebih memobilisasi petani miskin ke arah yang lebih berdaya dan mandiri perlu didorong dan dimotivasi terbentuknya jaringan kelembagaan secara horizontal antara kelompok usaha yang terbentuk dengan pelaku usaha lain dan diciptakan adanya kepemilikan kapital melalui inovasi pengembangan keuangan masyarakat.

Sebagai stimulan kepada kelompok usaha bersama itu dapat di beri sentuhan modal awal untuk terciptanya kegiatan kelompok. Strategi pengembangan kemampuan dalam permodalan usaha KUB harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Bagi daerah-daerah miskin di lokasi marginal dapat dimulai dengan memberi bantuan dalam bentuk bantuan cuma-cuma atau bantuan bergulir.

Bantuan diberikan atas dasar kebutuhan penduduk setempat sesuai hasil analisa kebutuhan (*need-analysis*). Bantuan permodalan bagi KUB dapat juga diberikan dalam bentuk Kredit-Subsidi atau Kredit Komersial dengan kemudahan khusus.

Apabila KUB dimulai dengan bantuan cuma-cuma, maka tidak boleh terlalu lama beputar-putar disitu saja. Bentuk bantuan harus ditingkatkan kepada bantuan yang sifatnya bergulir. Kalau mampu menggulirkan bantuan itu, maka dinaikan kepada bantuan kredit-subsidi. Dan kalau bantuan kredit subsidi ini mampu mereka kembalikan dengan lancar, maka dinaikkan kepada kredit komersial yang diberi kemudahan khusus antara lain tanpa jaminan.

Akhirnya apabila telah beberapa kali mampu mengembalikan kredit komersial ini dengan lancar, maka naikkan lagi ke kredit mandiri dalam kebutuhan permodalan usaha. Artinya apabila mereka membutuhkan tambahan modal bagi pengembangan usahanya mereka mampu berhubungan dengan Bank sendiri dan mampu memenuhi persyaratan Bank (*bankable*). Dengan cara pemberian bantuan yang sifatnya mendidik seperti itu, maka akhirnya akan mampu menghilangkan ketergantungan dan akan tumbuh keswadayaan sehingga mereka mampu berusaha dalam Sistem Ekonomi Pasar.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

- Meskipun petani miskin umumnya berada di lahan kering dengan persediaan air terbatas, tetapi masih memiliki potensi yang jika ditangani dengan baik dapat berkembang untuk mengatasi berbagai kendala/kelemahan yang dimilikinya.
- Strategi pemberdayaan petani miskin ke arah yang mandiri dapat ditempuh antara lain melalui wahana kelompok usaha bersama,
- Untuk lebih memobilisasi petani miskin ke arah yang lebih berdaya dan mandiri perlu didorong dan dimotivasi terbentuknya jaringan kelembagaan secara horizontal antara kelompok usaha yang terbentuk dengan pelaku usaha lain dan diciptakan adanya kepemilikan kapital melalui inovasi pengembangan keuangan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- ADB, 2003. Handbook on Poverty and Social Analysis, Section III. Poverty and Social Analysis in Project Preparation.
- BPS, 2003. Penduduk Fakir Miskin. Kerjasama Badan Pusat Statistik Dengan Departemen Sosial RI.
- Fagi, A.M., 2002. Saran Bagi Keberhasilan Proyek Pengentasan Kemiskinan Kerjasama ADB, 2003 – 2007. Kertas Kerja 08/2002 Seri AKTP:02/STP/03/2002. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan.
- Hendayana, R., dkk., 2003. Pengembangan Inovasi dan Diseminasi Teknologi Pertanian Untuk Pemberdayaan Petani Miskin Pada Lahan Marginal di Kabupaten Lombok Timur. Laporan Kegiatan PRA. Balai Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian.
- Hendriwan, 2003. Penanggulangan Kemiskinan Dalam Kerangka Kebijakan Desentralisasi. Makalah Falsafah Sains (PPS 772). Program Pasca Sarjana/S3 Institut Pertanian Bogor.
- Muhammad, M., 2004. Anatomi Kemiskinan di Indonesia. Harian Kompas Tempo. Senin 12 Juli 2004.

- Nurmanaf, R., 2001. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Dalam Perspektif Pembangunan Partisipatif di Wilayah Agroekosistem Marjinal. Laporan Hasil Penelitian, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian.
- Pakpahan, A., 1993. Identifikasi Wilayah Miskin di Indonesia. Perisma No3 tahun XII. LPES.
- Sallatang, M.A., 1980. Kemiskinan dan Mobilisasi Pembangunan di Desa. Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalama Negeri. Jakarta.
- Sayogyo, 1976. Kata Pengantar Dalam Penduduk dan Kemiskinan Oleh Masri Singaribun dan DH Penny. Bharata Karya Aksara. Jakarta.

PROFIL PETANI MISKIN DI DESA HUTAN DAN UPAYA PEMBERDAYAANNYA

Tati Herawati, Budi Utomo dan W. Dirjoprano
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah

ABSTRAK

Telah dilakukan penelusuran profil petani miskin di desa hutan Ngrawoh kabupaten Blora untuk mengetahui komponen teknologi yang diperlukan. Metoda yang digunakan untuk penelaahan tingkat terapan teknologi adalah metoda studi *impact point*. Penilaian enam tahap adopsi yaitu *Tidak mengetahui, Mengetahui, Berminat, Menilai, Mencoba dan Adopsi* digunakan untuk menilai tingkat pengetahuan teknologi. Komponen terakhir yang diamati adalah nilai analisa usahatani ternak kambing. Diperoleh bahwa faktor-faktor penentu teknis untuk peningkatan produktivitas kambing di petani adalah pengetahuan mengenai bibit (5%), sistim perkawinan (10%), frekuensi pemberian pakan, konsentrat, mineral dan air minum (16,7%), vaksinasi (10%) dan sistim pencatatan usahatani (16,7%). Spesifikasi gender dalam kegiatan usahatani kambing merupakan prototipe usaha ternak keluarga. Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan penentu keputusan *kegiatan produksi* ternyata masih didominasi oleh pria. Ibu tani berperan dalam penentu keputusan untuk kegiatan-kegiatan *reproduksi dan sosial*. Komponen teknologi yang sudah diadopsi adalah *perbibitan dan manajemen pemeliharaan*, tetapi baru 20% dari petani. Komponen lainnya masih dalam taraf *mengetahui dan berminat*, bahkan teknologi pasca panen belum ada yang mengetahui sama sekali. Nilai B/C usahatani kambing diperoleh 0,66 dengan tidak memperhitungkan tenaga kerja keluarga. Hal ini dapat dilihat juga dari nilai imbalan tenaga kerja yang jauh lebih kecil (Rp 3.189) dari nilai upah riil per hari (Rp 20.000) yang berlaku di desa Ngrawoh. Upaya pemberdayaan yang disarankan adalah inovasi teknologi dan inovasi kelembagaan yang diaktualisasi melalui kegiatan estimasi daya dukung wilayah, penyusunan formula ransum lokal dan perakitan teknologi; bantuan modal bergulir, pelatihan, pengawalan proses adopsi teknologi; memfasilitasi pemberdayaan kelompok tani, pengembangan kelembagaan desa dan penelusuran dinamika ekonomi pedesaan.

Kata kunci : Petani miskin, desa hutan, *Impact point*, adopsi teknologi

PENDAHULUAN

Di daerah-daerah terpencil seperti desa hutan relatif tertinggal jauh hampir di semua bidang pembangunan di wilayah tersebut karena jarak yang jauh merupakan salah satu faktor penghambat pertumbuhan kegiatan usaha pertanian di pedesaan. Sehingga di wilayah seperti itu banyak ditemukan kantong-kantong kemiskinan yang kesejahteraan masyarakatnya sangat tertinggal di banding wilayah irigasi atau wilayah lainnya yang telah banyak tersentuh oleh pembangunan.

Menurut Pakpahan *et. al.*, (1995) dalam Anonym (2003), secara garis besar kemiskinan dapat disebabkan oleh *market failure* dan *political failure*. *Market failure* terjadi apabila sebagian besar kelompok miskin termasuk dalam angkatan kerja yang memperoleh upah tidak mencukupi kebutuhan dasar mereka. Sedangkan *political failure* terjadi apabila struktur politik ekonomi menyebabkan distorsi dalam penyampaian kepentingan kelompok miskin. Sebagian besar terjadinya kemiskinan dalam suatu masyarakat adalah kombinasi dari kedua penyebab tersebut diatas, sehingga lebih menyulitkan dalam mengatasi penyebabnya.

Pembangunan pedesaan akan meningkatkan akses penduduk miskin dalam memanfaatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara memperbaiki kualitas hidup. Guna meningkatkan pendapatannya, petani miskin harus mampu berinovasi dalam memproduksi dan memasarkan hasil pertanian untuk merespon peluang pasar melalui investasi sederhana di tingkat desa dan penyediaan dukungan teknologi tepat guna. Dalam perjalanannya, petani dihadapkan pada keterbatasan modal, keterbatasan pengetahuan, ketiadaan sarana dan prasarana produksi, lemahnya infrastruktur dan panjangnya rantai pemasaran. Bagi petani miskin, kendala-kendala tersebut menjadi penghambat dalam mengadopsi inovasi teknologi yang dibutuhkan untuk berperan dalam berusahatani secara komersial.

Di kabupaten Blora terdapat beberapa desa “hutan”, yaitu desa yang dikelilingi hutan dengan penduduknya yang dapat dikategorikan miskin. Desa hutan ini merupakan desa terpencil yang lokasinya jauh dari pusat pertumbuhan. Lokasi desa yang relatif jauh ini merupakan salah satu faktor penghambat pertumbuhan kegiatan usaha pertanian di pedesaan. Walaupun demikian, lahan hutan yang banyak terdapat hijauan pakan merupakan sumber daya dukung usaha peternakan yang sangat

besar (Siregar dan Prawiradiputra, 1982). Selain itu, jenis tanah, suhu dan kelembaban lahan cukup favorable untuk perkembangan ternak kambing (Wiloeto, 2003). Oleh karena itu, Badan Litbang Pertanian melalui Proyek Peningkatan Pendapatan Petani Miskin Melalui Inovasi (*Poor Farmers Income Improvement Through Innovation Project – PFI3P*) membangun sistem agribisnis di desa ini melalui pemberdayaan petani, pengembangan kelembagaan desa dan perbaikan sarana/prasarana pendukung di desa secara partisipatif, disertai inovasi teknologi dan peningkatan akses jaringan informasi.

Dengan keterbatasan waktu dan biaya, diperlukan pemilihan yang tepat mengenai komponen yang akan diinovasikan. Oleh karena itu diperlukan penelaahan profil petani sebagai sasaran kegiatan sehingga upaya pemberdayaannya dapat diformulasikan dengan tepat. Diharapkan dengan adanya inovasi teknologi usaha peternakan kambing didesa hutan ini, pengentasan kemiskinan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan kelembagaan usahatani dapat segera tercapai dan sasaran program pemerintah daerah yaitu pengembangan sentra produksi ternak kambing di kabupaten Blora dapat diwujudkan.

METODOLOGI

1. Identifikasi karakteristik desa hutan

Kegiatan dilakukan di desa hutan Ngrawoh, kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora. Untuk mengidentifikasi karakteristik desa, dilakukan pengumpulan data primer dan data sekunder mengenai sumberdaya alam dan sarana fisik yang ada di desa. Data primer dilakukan melalui observasi lapang. Sedangkan data sekunder diambil dari kantor desa dan kantor kehutanan setempat.

2. Penelaahan Profil Petani

Untuk mengetahui profil petani miskin di lahan hutan dilakukan inventarisasi informasi keluarga petani koperator, mengenai :

- a) Kondisi sosial ekonomi petani,
- b) Tingkat terapan teknologi budidaya kambing
- c) Analisa usahatani ternak kambing pada level terapan teknologi

Informasi mengenai kondisi sosial ekonomi petani dikumpulkan melalui sensus dengan metoda wawancara (Koentjaraningrat, 1997) dan observasi langsung pada semua petani calon koperator dan juga non koperator. Peubah yang diamati adalah jumlah anggota keluarga, mata pencaharian kepala keluarga, kondisi rumah, sumber air minum dan keperluan RT, kepemilikan lahan serta jenis usahatani keluarga.

Tingkat terapan teknologi ditelaah dengan metoda baku studi *impact point* yang sekaligus mencari faktor-faktor penentu teknis untuk peningkatan produktivitas kambing (Herawati *et. al.*, 2000) Ada enam komponen teknologi yang dinilai yaitu perbibitan, pakan, tata laksana pemeliharaan, perkandangan, kesehatan dan pasca panen, yang masing-masing diuraikan atas komponen-komponennya sehingga keseluruhannya berjumlah 28 komponen teknologi. Dua tahapan seleksi dilakukan untuk memperoleh faktor penentu yaitu :

- I. Pertama berdasarkan 50% terbesar dari parameter kepemilikan ternak untuk tiap terapan teknologi yang bernilai dibawah skor maksimum,
- II. Kedua, 50% skor terkecil dari parameter persentase tingkat penerapan teknologi.

Sedangkan untuk mengetahui tahapan teknologi yang diintroduksikan digunakan metoda penilaian enam tahap adopsi yaitu *Tidak mengetahui, Mengetahui, Berminat, Menilai, Mencoba dan Adopsi*.

Komponen terakhir yang diamati adalah nilai analisa usahatani ternak kambing, yaitu nilai nisbah pendapatan dan biaya yang dikeluarkan (B/C), dimana :

$$B/C = \frac{\sum R_i - \sum C_j}{\sum C_j} \quad ; \quad \begin{array}{l} i = \text{jenis pendapatan} = 1, \dots, n \\ j = \text{jenis pengeluaran} = 1, \dots, k \end{array}$$

dan mengingat banyaknya penggunaan tenaga kerja keluarga untuk mengelola kambingnya dan semua input yang tidak dibeli, maka dilakukan penghitungan imbalan tenaga kerja (ITK).

$$ITK = \frac{\sum R_i - \sum C_j}{\sum HOK}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Desa Hutan Ngrawoh dan Peluang Pengembangan Kambing

1. Sumber Daya Alam dan Sarana Fisik

Desa Ngrawoh merupakan desa terpencil yang lokasinya jauh dari pusat pertumbuhan. Lokasi desa yang relatif jauh ini merupakan salah satu faktor penghambat pertumbuhan kegiatan pertanian di pedesaan. Hal ini berkaitan dengan miskinnya akses informasi, sarana produksi, maupun akses untuk memasarkan hasil pertaniannya. Jauhnya lokasi desa dengan kota kabupaten maupun kecamatan ini berimplikasi pada besarnya biaya transportasi yang harus dikeluarkan petani untuk ke kota dalam kaitannya dengan kegiatan agribisnis.

Desa Ngrawoh merupakan desa yang dikelilingi hutan seluas 715,030 ha, yang seluruhnya merupakan hutan Negara. Hanya 7,43% dari total luasan desa 772,392 ha yang bukan hutan, yaitu terdiri dari 5,862 ha sawah tadah hujan, 38,750 ha lahan kering/tegalan, 11,75 ha lahan pemukiman dan 1 ha lain-lain (Anonym (a), 2003). Lebih dari 10% hutan telah dilakukan penghijauan tanaman jati dengan sepertiganya ditanami tanaman lamtoro, yang diperkenankan diambil petani *pesanggem* untuk keperluan pakan ternak. Jika data ini benar, maka luas lamtoro saja kurang lebih 23,8 ha. Dengan produktivitas lamtoro sebesar 100 ton/ha/tahun (Siregar dan Prawiradiputra, 1982), maka produksi lamtoro saja yang ada di hutan tersebut sebanyak 2380 ton/tahun. Diketahui dari hasil-hasil penelitian keperluan kambing akan HMT sebesar 1,764 ton/tahun, maka jumlah lamtoro yang ada dapat mendukung 1349 ekor kambing, padahal populasi kambing yang ada menurut monografi terakhir yaitu September 2003 berjumlah 240 ekor, sehingga masih banyak peluang penambahan. Jika setengah dari warga desa yaitu 88KK berusahatani kambing, maka dapat dipenuhi skala minimum kepemilikan ternak kambing 8 ekor seperti anjuran Soedjana dan Priyanti (1989). Peluang ini akan bertambah besar lagi jika telah diperhitungkan sumber hijauan lainnya yang bisa dimanfaatkan di hutan tersebut seperti *calopogon sp.*, *centrosema sp.* dan lain-lain yang banyak terdapat di hutan tersebut. Begitu pula limbah tanaman pangan yang banyak terdapat di Ngrawoh misalnya daun jagung, daun kacang tanah serta ramban. Artinya, dukungan sumberdaya alam bagi pengembangan ternak kambing di desa Ngrawoh sangat besar.

Jenis tanahnya didominasi oleh jenis grumosol (Wiloeto, 2003). Dari hasil penelitian Herawati *et. al.*, (1992) di berbagai tipologi lahan di daerah pasang surut, menunjukkan bahwa pertumbuhan ternak lebih ditentukan oleh manajemen pemeliharaan bukan oleh jenis tanah. Oleh karena itu jenis tanah grumosol di desa Ngrawoh ini tidak akan berpengaruh banyak pada perkembangan ternak kambing sepanjang sistem pemeliharaannya cukup baik. Selain itu kesuburan tanah grumosol dikategorikan sedang bagi pengembangan ternak (Ditjennak, 2000).

Suhu rata-rata harian berkisar antara 27-32°C dan rata-rata curah hujan tahunan 1.864 mm/tahun, yang terdiri dari 5 bulan basah dan 7 bulan kering. pH air tanah 8,0. Kondisi lingkungan yang optimum bagi pertumbuhan kambing yang baik adalah 28-33°C (Williamson & Payne, 1993). Dari data ini lingkungan di desa Ngrawoh berada dalam kisaran toleransi pertumbuhan kambing.

Sarana fisik yang ada didesa adalah jalan aspal yang masuk kelas IV sepanjang 4,8 km dan jembatan 4 buah. Selebihnya jalan berupa jalan tanah. Tambahan 800 m jalan aspal baru dibuat pada tahun 2003 yang lalu dengan didanai oleh P2MPD sepanjang 600 meter dan DPDK sepanjang 200 meter. Secara umum, keadaan infrastruktur ditinjau dari sarana jalan untuk kegiatan agribisnis cukup mendukung. Kondisi jalan yang telah beraspal ini cukup mendukung pengembangan wilayah, karena kondisi sarana fisik jalan dan jauhnya lokasi desa dengan pusat pemasaran yang biasanya terdapat di kecamatan atau kabupaten berimplikasi pada besarnya biaya transportasi yang harus dikeluarkan petani dalam kaitannya dengan kegiatan agribisnis. Jalan digunakan untuk lalu lintas keperluan input usahatani maupun outputnya. Semakin buruk kondisi jalan dan semakin jauh, maka semakin besar nilai biaya yang dikeluarkan yang berdampak pada berkurangnya nilai keuntungan usahatani atau

memperkecil nilai B/C. Adanya penambahan perbaikan jalan akan sangat mendukung perkembangan ternak.

2. Kelembagaan

Jumlah toko ada 4 buah, tapi tidak ada satupun yang menjual sapronak maupun saprotan. Walaupun demikian, mereka bersedia menyediakan jika dipesan. Pada umumnya bahan-bahan dibeli di Menden, kota kecamatan.

Koperasi Unit Desa maupun penangkar benih belum ada. Hanya ada satu RMU (Rice Milling Unit) milik desa, tetapi karena sedikitnya gabah yang digiling, maka uang sewa hanya cukup untuk operasional dan upah operator, tidak ada pemasukan kas desa. Limbah gilingan berupa dedak, biasanya diambil oleh yang menggilingkan, sehingga penggunaan dedak untuk ternak hanya ada pada peternak yang memiliki sawah. Luas sawah di desa ini 5,862 ha berupa sawah irigasi sederhana atau berupa lahan tadah hujan. Dengan asumsi diperoleh 9 ton GKP/ha, maka total produksi 52,758 ton GKP, yang akan menghasilkan 158,274 ton dedak. Dengan hitungan kebutuhan kambing akan konsentrat 0,805 kg/ekor/hari atau 293,830 kg/ekor/tahun, maka peluang pemanfaatan dedak untuk pakan tambahan dapat digunakan untuk 539 ekor kambing selama setahun.

Kelembagaan penunjang kegiatan agribisnis yaitu KUD atau koperasi, kios saprodi atau penangkar benih di desa ini belum ada. Begitu pula kelembagaan untuk pasca panen dan pemasaran masih sangat terbatas, dimana RMU hanya satu, bahkan dryer, tempat penjemuran, peralatan pengolahan hasil maupun pasar hasil pertanian belum ada sama sekali. Begitu pula kelembagaan aktivitas petani seperti P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) dan kontak tani tidak ada sama sekali, hanya kelompok tani yang ada, tetapi itupun tidak pernah aktif. Sehingga untuk menjadikan wilayah ini daerah agribisnis, komponen dari ketiga kelompok kelembagaan ini harus diberdayakan.

Profil Petani Ternak Kambing Desa Ngrawoh

1. Kondisi Sosial Ekonomi

Kemiskinan merupakan suatu fenomena multidimensional. Tolok ukur lain yang memiliki korelasi tinggi dengan kemiskinan adalah bidang kesehatan, pendidikan, kualitas perumahan, nutrisi (terutama kelangkaan pangan pada kelompok rawan seperti ibu hamil atau menyusui), ukuran, dan struktur keluarga (terutama bagi ibu sebagai kepala keluarga). Hasil observasi menunjukkan bahwa pada sebagian besar (105 rumah) kondisi rumah petani terbuat dari kayu dengan lantai tanah, tetapi penerangan sudah menggunakan listrik dari PLN. Sedangkan 70 rumah lainnya terbuat dari bambu. Sumber air minum dan keperluan air untuk rumah tangga berasal dari sumur milik bersama, air sungai dan air hujan. Satu sumur bersama yang dianalisa ternyata airnya cukup basa yaitu mempunyai pH 8,0. Secara umum dapat dikategorikan penduduk desa ini miskin seperti yang tercantum dalam konsep kegiatan PFI3P (Anonym, 2003), yaitu petani yang produktivitas usahatani rendah, pendapatan perkapitanya lebih rendah dari Rp 1.000.000/ tahun dan bagi yang mengusahakan sumberdaya communal, belum mencukupi kebutuhan dasarnya, walaupun tidak termasuk yang memiliki lahan yang sempit (< 0,1 ha) dan hanya mengusahakan usahatani tanaman pokok saja (monokultur). Oleh karena itu sangat perlu diprioritaskan untuk meningkatkan pendapatannya.

Petani mempunyai mata pencaharian utama yang beragam, hanya 20,6% dari petani yang berkerja on farm, 18,2% lainnya off farm yaitu buruh tani dilahan orang dan sisanya 61,2% non farm yaitu buruh industri, buruh bangunan, pedagang, PNS/ABRI, tukang kayu pembuat bahan rumah dan pencari kayu bakar (Anonym (a), 2003).

Jumlah penduduk dari 175 KK sebanyak 588 orang, terdiri dari 300 orang laki-laki dan 288 orang wanita, dimana angkatan kerja (usia 15 tahun s/d 60 tahun) sebanyak 59,18%. Nilai yang kurang signifikan untuk dijadikan pegangan sebagai sumber tenaga kerja. Hal lain yang dapat dipertimbangkan dari jumlah penduduk wanita yang seimbang dengan jumlah laki-laki, adalah tingkat keterlibatan wanita dalam pengelolaan usahatani kambing.

Seperti pada umumnya di daerah pedesaan dimana grafik pendidikan berupa parabola terbuka kebawah, latar pendidikan sebagian besar penduduk yaitu 55,19% adalah tamat SD, hanya 13,65% berpendidikan SLTP keatas dan 1 orang alumni perguruan tinggi. Pentingnya latar pendidikan petani ini diketahui agar materi dan bentuk penyuluhan dapat disesuaikan dengan tingkat kemampuan penerima.

Luas kepemilikan lahan pada umumnya berkisar dari 0,2 – 0,5 ha dalam satu hamparan lahan pekarangan, yang digunakan untuk usahatani cabe, jagung, kedelai, singkong dan pisang tanpa terapan teknologi yang memadai. Sedangkan ternak yang dipelihara di semua kooperator adalah kambing dan ayam dengan kisaran kepemilikan kambing 1-22 dan kisaran kepemilikan ayam 3-25 ekor (Wiloeto, 2003). Jenis tanaman yang ditanam ini dapat membantu pengembangan tenak kambing sebagai alternatif bahan pakan.

Pendapatan petani diperoleh dari pekerjaan utamanya dan penjualan kambing setahun sekali 2-4 ekor, yang secara total masih dibawah angka Upah Minimum Regional (UMR), sehingga sangat diperlukan uluran tangan pemerintah untuk membantu meningkatkan pendapatan.

2. Tingkat Terapan Teknologi Budidaya Kambing

Tahapan terapan teknologi yang diintroduksikan, baru dari segi perbibitan dan manajemen pemeliharaan yang sudah ada yang mengadopsi, tapi baru 20% dari koperator (Tabel 1). Komponen lainnya masih dalam taraf mengetahui dan berminat, bahkan mengenai pasca panen belum ada yang mengetahui sama sekali. Rendahnya pengetahuan mengenai penyakit, yaitu 80% dari petani tidak mengetahui mengenai penyakit yang biasa melanda kambing yaitu scabies, pneumonia, bloat/tympani serta tidak pernah melakukan vaksinasi, mungkin dikarenakan tidak pernah terjadi penyakit-penyakit ini. Yang umum terjadi adalah penyakit mata dan kembung perut. Pengobatan dilakukan dengan menggunakan cara tradisional atau obat manusia.

Tabel 1. Persentase Terapan Teknologi Petani Koperator Sebelum Pembinaan (%)

Komponen Teknologi	Tahapan Terapan Teknologi					
	Tidak Mengetahui	Mengetahui	Berminat	Menilai	Mencoba	Adopsi
Perbibitan/ Reproduksi	0	0	80	0	0	20
Pakan	0	40	60	0	0	0
Manajemen Pemeliharaan				20	60	20
Perkandangan	80	20	0	0	0	0
Penyakit/ Kesehatan	80	20	0	0	0	0
Pasca Panen	100	0	0	0	0	0

Sumber : hasil pengolahan data primer

Dari hasil penelaahan komponen teknologi, faktor-faktor penentu teknis untuk peningkatan produktivitas kambing di petani koperator adalah pengetahuan mengenai bibit, sistim perkawinan, frekuensi pemberian pakan, konsentrat, mineral dan air minum, vaksinasi dan sistim pencatatan usahatani dengan nilai terapan 5 - 16,7%. (Tabel 2). Artinya, faktor-faktor tersebut merupakan komponen-komponen teknologi yang perlu mendapat prioritas pembinaan dilihat dari rendahnya skor terapan teknologi.

Selanjutnya juga diamati pelaku kegiatan pengelola usahatani ternak kambing pada petani koperator. Diperoleh bahwa kegiatan usahatani kambing dilakukan oleh kepala keluarga berikut segenap anggota keluarganya. Peran wanita tani/ ibu tani menonjol terutama untuk kegiatan membersihkan kandang dan mengumpulkan kotoran. Sedangkan memberi pakan, mengambil HMT, melihat gejala penyakit dan memberi obat ternak dilakukan bergantian antara bapak dan ibu tani. Selebihnya, kegiatan lain diluar ini dilakukan bapak tani dan anggota keluarga lainnya yang laki-laki. Pola ini merupakan prototipe usahatani keluarga di desa ini karena ternyata semua koperator memiliki pola yang sama. Informasi ini diperlukan untuk efisiensi alih teknologi pada waktu mengadakan pelatihan.

Tabel 2. Skor Tingkat penerapan Teknologi Usaha Ternak Kambing

NO	KOMPONEN TEKNOLOGI	SKOR TINGKAT TERAPAN TEKNOLOGI (%)
1.	Jenis bibit yang dipelihara	5,0
2.	Sistim/ cara perkawinan	10,0
3.	Vaksinasi/ Cegah penyakit	10,0
4.	Sistim seleksi bibit	15,0
5.	Frekuensi pemberian HMT	16,7
6.	Konsentrat	16,7
7.	Mineral	16,7
8.	Jumlah air minum	16,7
9.	Pengawetan/ Pengolahan HMT	16,7
10.	Pencatatan/ recording	16,7

Sumber : hasil pengolahan data primer.

Teknologi sanitasi kandang dan pembuatan kompos lebih efisien diajarkan langsung pada ibu tani daripada ke bapak tani. Pada tahap kajian sekarang belum diketahui pola transfer teknologi, sehingga besar *bias transferring* belum dapat dihitung antar narasumber, sehingga disarankan kegiatan ajar-belajar dilaksanakan langsung ke pelaku kegiatan. Analog untuk kegiatan komponen teknologi lainnya. Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan penentu keputusan *kegiatan produksi* ternyata masih didominasi oleh pria. Ibu tani berperan dalam penentu keputusan untuk kegiatan-kegiatan *reproduksi dan sosial*.

3. Analisa Usahatani Kambing

Pada Tabel 3. dihitung keuntungan usahatani kambing dengan menggunakan data input maupun output yang biasa petani peroleh sebelum dilakukan binaan, dengan skala usaha rata-rata 3 ekor kambing betina dan melakukan semua kegiatan tanpa mengupahkan.

Dalam inovasi teknologi, bukan hanya ditujukan untuk peningkatan produktivitas saja, tetapi yang lebih penting dari itu adalah peningkatan pendapatan bersih usahatani, sehingga petani sebagai beneficiaries dari pengembangan teknologi dapat menerapkan teknologi introduksi secara berkelanjutan. Perbedaan teknologi introduksi dibanding dengan teknologi pola petani seharusnya cukup signifikan agar teknologi introduksi dapat berkembang pada masyarakat pengguna.

Tabel 3. Analisa Usahatani Kambing Selama Satu Tahun Pada Teknologi Petani

Uraian	Satuan	Volume	Harga/ Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
<i>Pengeluaran :</i>					
Modal Bibit	Ekor	3	350.000	1.050.000	
Kandang	Bh	1	213.500	42.700	Est.tahan5 thn
Pakan HMT	HOK	90		0	Ambil HMT
Pakan konsentrat	Kg	0		0	
Obat2an	Rp	0		0	
TK	HOK	135			TKK
Total Biaya +upah	Rp			5.592.700	
Total biaya - upah	Rp			1.092.700	
<i>Penerimaan :</i>					
Ternak anak	ekor anak /thn	3,0	250.000	750.000	
Ternak induk	Ekor/thn	3,0	350.000	1.050.000	
Kotoran	kg/ekor/thn	408		10.000	
Total Penerimaan	Rp			1.810.000	
Pendapatan	Rp			717.300	
Total TK	HOK	225			
B/C				0,66	
ITK	Rp/HOK			3.188	

Sumber : hasil pengolahan data primer

Secara teori perbedaan antara teknologi introduksi dengan teknologi pola petani dapat dibedakan atas produktivitas atau dari keuntungan usahatani. Dari hasil hitungan diperoleh nilai pendapatan 717.300 rupiah per 3 ekor kambing atau 239.100 rupiah per ekor kambing. Usahatani masih dikategorikan menguntungkan dengan melihat nilai B/C yang positif karena semua tenaga kerja tidak diperhitungkan, tetapi jika diperhitungkan maka nilai pendapatan menjadi negatif alias rugi (minus 3.782.700 rupiah). Hal ini dapat dilihat juga dari nilai ITK yang lebih kecil (Rp 3188) dari nilai upah riil per hari (Rp 20000) yang berlaku di desa Ngrawoh.

Jika usahatani kambing dilakukan dengan menerapkan teknologi anjuran, keuntungan dapat ditingkatkan menjadi lebih dari dua kali lipat dan nilai ITK dapat menjadi hampir 6 kali lipat sebelumnya, walaupun masih dibawah nilai riil upah TK. Sebagian pakar ekonomi pertanian mengatakan paling sedikit perbedaan tersebut antara 15-20%, maka teknologi yang diintroduksi layak untuk didesiminasikan ke beneficiaries. Oleh karena itu, dari hasil hitungan ini menunjukkan bahwa teknologi yang akan diintroduksi sangat layak dikembangkan.

SARAN UPAYA PEMBERDAYAAN

Upaya pemberdayaan petani miskin di desa Ngrawoh dilakukan melalui program pengembangan agribisnis kambing di lahan marjinal didukung oleh dua program utama yang saling menunjang, yaitu: (1) Inovasi teknologi dan (2) Inovasi kelembagaan/pemberdayaan petani.

Inovasi Teknologi

Teknologi yang diintroduksi dipilih berdasarkan pendalaman faktor-faktor penentu teknis terapan adopsi teknologi yang ada dan mempertimbangkan konservasi lingkungan. Oleh karena itu kajian potensi daya dukung sumberdaya alam dan formulasi pakan lokal merupakan bagian yang tak terpisahkan dari inovasi teknologi budidaya ternak.

Tahap berikutnya, inovasi teknologi yang telah dihasilkan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian disampaikan kepada petani melalui kelembagaan-kelembagaan yang ada di desa yaitu penyuluh pertanian dan kelompok tani, berupa kelompok demo, pelatihan, temu lapang, buku petunjuk atau lokakarya ditingkat kecamatan/ kabupaten. Inovasi teknologi budidaya kambing memberikan arahan penggunaan input dan pengelolaan lingkungan termasuk model perkandangan, sistim reproduksi, "flushing", pemberian pakan, pembuatan kompos, penanaman tanaman pakan dan pemeliharaan kesehatan.

Hasil inovasi teknologi diteruskan ke Sistim Informasi untuk dibuat paket-paket yang cocok untuk disebarkan ke berbagai pengguna, antara lain penyuluh, petani, dsb. Sistim informasi, selain memberikan informasi mengenai teknologi, juga memberikan informasi mengenai harga-harga produk pertanian dan harga sarana produksi serta volume penyerapan barang di beberapa pasar utama.

Inovasi kelembagaan/ pemberdayaan petani dan KT

Pembangunan pedesaan akan meningkatkan akses penduduk miskin terhadap manfaat pertumbuhan ekonomi dengan memperbaiki kualitas hidup. Guna memperbaiki pendapatannya, petani miskin harus mampu berinovasi dalam produksi dan pemasaran pertanian untuk merespon peluang pasar dengan upaya pemberdayaan melalui investasi sederhana di tingkat desa, penyediaan dukungan teknologi tepat guna bagi daerah marjinal dan penyediaan sumber informasi yang relevan. Dalam perjalanannya, petani dihadapkan pada keterbatasan modal, keterbatasan pengetahuan, ketiadaan sarana dan prasarana produksi, buruknya infrastruktur desa dan panjangnya jalur pemasaran. Kurang memadainya akses komunikasi horizontal dan vertikal terhadap informasi turut mengurangi akses petani terhadap teknologi, pasar potensial bagi produknya, harga pasar, sumber dan harga input produksi, serta pemecahan potensial terhadap masalah-masalah usahatani. Bagi petani miskin, kendala-kendala tersebut menjadi penghambat dalam mengadopsi inovasi produksi dan pemasaran yang dibutuhkan untuk berkecimpung dalam produksi secara komersial dan dapat mengakses manfaat pertumbuhan ekonomi secara lebih luas.

Inovasi kelembagaan di desa diarahkan agar dapat memfasilitasi kegiatan penyuluhan, pengadaan sarana produksi pertanian, serta perbaikan infrastruktur desa. Infrastruktur desa yang sangat membantu perbaikan kualitas kegiatan pengembangan ternak kambing antara lain jalan dan

pasar. Oleh karena itu, diawali pemberian bantuan bergulir pada kelompok tani yang akan diteruskan ke seluruh anggotanya, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan peningkatan peran anggota keluarga dalam usahatani, pemberdayaan petani, pemberdayaan lembaga-lembaga desa dan rekayasa dinamika ekonomi pedesaan untuk menunjang keberhasilan usahatani peternak sekaligus mendorong pembentukan wilayah agribisnis.

Kedua program ini disusun untuk mencapai tiga sasaran kegiatan pendukung pengembangan wilayah agribisnis yaitu (1) Peningkatan produktivitas dan produksi kambing (2) Peningkatan kondisi sosial ekonomi petani dan (3) Peningkatan aktifitas lembaga desa. Oleh karena itu kedua program utama tadi direalisasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang akan mencapai ketiga sasaran kegiatan, yaitu :

1. Peningkatan produktivitas dan produksi

- Kegiatan diawali dengan mengkaji potensi wilayah untuk mengetahui potensi hijauan makanan ternak (HMT) lokal atau **daya dukung HMT** yang ada di desa tersebut, pada musim penghujan (MH) dan musim kemarau (MK). Jika diketahui HMT cukup tersedia dan melimpah di MH, tetapi kekurangan di MK, maka teknologi silase dapat dipertimbangkan untuk diintroduksi agar terapan teknologi pemberian pakan berkelanjutan.
- Dari hasil inventarisir jenis-jenis HMT yang *palatable* dan baik dikonsumsi kambing disusun **formula ransum** yang merupakan kombinasi dari berbagai hijauan yang ada, tetapi mengikuti kaedah-kaedah pengaturan pemberian pakan ternak kambing, antara lain proporsi antara rumput dan leguminosa, tambahan jenis konsentrat, pengaturan kuantitas dan kualitas ransum untuk tiap kondisi ternak, dewasa, bunting, menyusui dan lepas sapih.
- Dengan metoda partisipatif, dilakukan perakitan teknologi yang perlu diintroduksi, meliputi model **perkandangan, sistim reproduksi, pemberian pakan, pembuatan kompos, penanaman tanaman makanan ternak (TMT), pemeliharaan kesehatan sekaligus sistim pemasaran**. Untuk kegiatan pemberian pakan perlu dilakukan pengkajian **super imposed**, sebagai ajang gelar teknologi pada peternak kooperator dihadapkan pada beberapa pilihan teknologi.

2. Peningkatan sosial ekonomi petani

- Agar teknologi yang diintroduksi dapat diterapkan sesuai anjuran, sarana produksi diberikan ke kelompok tani bina sebagai **bantuan modal bergulir** awal yang harus dikembangkan sebagai modal kelompok dan digulirkan kesemua anggota kelompok tani. Bantuan awal berupa 40 ekor kambing betina, 5 ekor kambing jantan, biaya untuk membuat kandang dan pakan konsentrat diberikan ke kelompok tani bina, kemudian kelompok membagikan rata ke lima petani koperator *kloter pertama*. Kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian pengembalian adalah setiap penerima ternak wajib mengembalikan ke kelompok sebesar dua kali jumlah ternak betina plus satu kali jumlah yang jantan.
- Sebelum dilakukan kegiatan pengembangan ternak di petani koperator (*on farm trial*), dilakukan pertemuan sekaligus **pelatihan** dengan calon petani koperator, yang bertujuan untuk :
 - (a) Sosialisasi visi dan misi program PFI3P
 - (b) Sosialisasi tujuan kegiatan pengkajian
 - (c) Menyamakan persepsi dalam pengembangan wilayah peternakan
 - (d) Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan beternak kambing

Peserta pelatihan bukan hanya petani koperator saja, melainkan juga petani-petani non koperator dari satu desa yang sama, calon penerima guliran bantuan kambing, serta tiga petugas penyuluh dari kecamatan Kradenan.

- **Pengawasan proses adopsi teknologi**. Dalam pembinaan petani koperator, ditugaskan seorang detarser untuk melakukan *pengawasan proses adopsi teknologi*. Bersama-sama dengan petugas lapang (PPL) dari Dinas Pertanian, dilakukan kunjungan lapang setiap hari selama periode pengkajian untuk membantu melaksanakan penerapan teknologi yang diintroduksi. Antara lain pembenahan model kandang, pengelompokan ternak, penimbangan konsentrat, penimbangan ternak, pembuatan kompos, pengaturan perkawinan, pemeriksaan dan pengobatan penyakit serta penanaman HMT.

- Sebagai bahan penilaian kegiatan, diakhir pengkajian akan dilakukan monitoring dan evaluasi kegiatan, dimana parameter-parameter yang dinilai berikut kategorinya disusun. Hasil penilaian ini sekaligus dapat men-justifikasi atau merevisi model-model yang dikembangkan seperti skala usaha, sistim CRF dll

3. Pemberdayaan kelembagaan

- Memfasilitasi pemberdayaan kelembagaan kelompok tani. Kelompok tani binaan adalah kelompok tani yang merupakan **restrukturisasi atau pengaktifan kembali kelompok tani** yang sudah lama terbentuk tetapi selama ini *koma*, karena tidak ada aktifitas bersama yang dilakukan. Dengan diawali kegiatan pengkajian ini yang mulanya melibatkan 5 anggota dan akan dikembangkan keseluruhan anggotanya, maka diharapkan kelompok tani ini dapat mulai aktif. Pembinaan KT sebagai upaya pemberdayaan KT dilakukan melalui kegiatan **pelatihan** peningkatan pengetahuan mengenai sistim organisasi, dinamika KT dan sistim administrasi KT atau melalui kegiatan lainnya berupa **lomba ketrampilan, temu lapang dan studi banding**.
- **Pengembangan kelembagaan desa.** Tujuan pengembangan kelembagaan adalah untuk menunjang pengembangan wilayah menjadi salah satu sentra agribisnis kambing. Tahap pertama adalah inventarisasi keberadaan dan kondisi lembaga-lembaga desa yang harus mendukung kegiatan pengembangan wilayah agribisnis kambing. Bekerjasama dengan instansi terkait, LSM (Lembaga Sosial Masyarakat) dan KID (Komite Investasi Desa), dilakukan penelusuran kegiatan dan masalah-masalah yang dihadapi tiap lembaga, mengadakan pertemuan dan memfasilitasi pelatihan jika diperlukan. Diharapkan dari kegiatan ini akan meningkatkan aktifitas lembaga-lembaga sarana dan prasarana produksi kambing serta terbentuk hubungan kerjasama yang erat antar sub sistim agribisnis.
- **Penelusuran Dinamika Ekonomi Pedesaan.** Dalam mengembangkan cikal bakal wilayah agribisnis, diperlukan pengetahuan dasar mengenai struktur jaringan pasar yang telah ada, kemudian dikembangkan model jaringan yang menguntungkan peternak melalui salah satunya adalah **temu usaha**.

KESIMPULAN

Desa Ngrawoh sebagai desa hutan mempunyai potensi besar untuk dikembangkan sebagai salah satu wilayah agribisnis atau sentra produksi kambing. Dengan memanfaatkan secara optimal sumberdaya alam yang ada disertai adanya inovasi teknologi dan pemberdayaan kelembagaan maupun sumberdaya manusianya, maka bukan hal yang mustahil petani yang dulunya dikategorikan miskin dapat menjadi salah satu saudagar ternak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous, 2003. Konsep Awal Inovasi Teknologi Mendukung Pengembangan Agribisnis Pertanian Lahan Marginal. Poor Farmer Income Improvement Through Innovation Project. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian.
- Anonymous, (a). 2003. Monografi Desa Ngrawoh, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora. Desa Ngrawoh.
- Ditjennak. 2000. Petunjuk Teknis Identifikasi dan Analisis Potensi Wilayah Pengembangan Peternakan. Bag. Proyek Pembinaan Pengembangan Peternakan Pusat. Direktorat Pengembangan Peternakan.
- Herawati, T., P. Sitorus dan M.H.Togatorop. 1992. Pengembangan Ternak di Lahan Rawa : Suatu Tinjauan Hasil-Hasil Penelitian *dalam* Risalah Pertemuan Nasional Pengembangan Pertanian Lahan Rawa Pasang Surut dan Lebak. Cisarua, 3-4 Maret 1992. Pusat Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian.

- Herawati, T dan S. Haryono. 2000. Kajian Faktor Penentu Teknis Dalam Pola Pengembangan Ayam Buras di desa Bunga Raya, Riau. Prosiding Seminar Nasional Peternakan dan Veteriner, Bogor 18-19 September 2000. Pusat Penelitian Peternakan, Badan Litbangtan, Dep. Pertanian.
- Koentjaraningrat. 1997. Metode Wawancara *dalam* Metode-metode Penelitian Masyarakat. Ed 3. PT. Gramedia Pustaka Utama. Hal 129-157.
- Soedjana, T.D dan A.Priyanti. 1989. Ekonomi Produksi dan Pemasaran *dalam* Penelitian Ternak Kambing dan Domba di Pedesaan. Balitnak/ SR-CRSP, Puslitbangnak, Badan Litbangtan, Dep.Pertanian.
- Siregar, ME. dan B.R. Prawiradiputra. 1982. Pengaruh Tinggi Pemotongan Terhadap Produksi Hijauan Lamtoro (*Leucaena Leucocephala cv Peru*). Proceedings Seminar Penelitian Peternakan. Cisarua, 8-11 Februari 1982. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian.
- Williamson,G. and W.J.A.Payne. 1993. Pengantar Peternakan di Daerah Tropis. Gajah Mada University Press.
- Wiloeto, D. 2003. Pemahaman Desa Miskin Secara Partisipatif di Kabupaten Blora. Draft Laporan PRA. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, Jawa Tengah. Unpublised.

ANALISIS FINANSIAL USAHATANI JAGUNG DI KECAMATAN AMANUBAN TIMUR, KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN, NTT

Nelson H. Kario¹⁾ Awaludin Hipi²⁾ Yusuf¹⁾

¹⁾ Peneliti Pada BPTP Nusa Tenggara Timur, ²⁾ Peneliti pada BPTP Nusa Tenggara Barat

ABSTRAK

Jagung merupakan komoditas pangan yang sangat penting bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Hal ini terlihat dari tingginya tingkat konsumsi terutama di pedesaan bahkan komoditas ini pula cenderung dijadikan komoditas sosial budaya, yang ditandai dengan dominannya petani mengikutsertakan sebagai makanan pokok dalam setiap acara baik kemasyarakatan maupun keagamaan. Dengan kondisi tersebut menyebabkan permintaan meningkat. Seiring dengan kondisi tersebut maka diperlukan dukungan kebijakan guna tercapainya hasil yang diharapkan. Badan Litbang Pertanian telah mengintroduksi salah satu model usahatani yaitu Sistem Usaha Pertanian (SUP) yang mampu mencapai hasil yang diharapkan dimana salah satu komponen teknologinya penggunaan jagung varietas Bisma. Salah satu kendala dalam penerapan usahatani komoditas ini adalah minimnya penggunaan sarana produksi sebagai dampak rendahnya pemilikan finansial rumah tangga petani. Tujuan penelitian adalah : 1. Mengetahui faktor share dan kompensasi pengelolaan, 2. Mengetahui titik impas harga dan produksi, 3. Mengetahui tingkat kompetitif antar model usahatani yang dikembangkan, 4. Mengkaji dampak perubahan beberapa komponen terhadap produktivitas usahatani. Lokasi penelitian di 10 desa dengan melibatkan sebanyak 1.008 petani. Teknologi yang diintroduksi terdiri atas dua model yaitu : Petani dan 2. Introduksi. Sedangkan untuk introduksi terbagi dua model pula yaitu : 1. tidak dipupuk 2. dipupuk. Komponen yang diintroduksi untuk dipupuk adalah : varietas Bisma, Dosis pupuk urea dan SP 36 yaitu : 200 Kg/ha dan 100 Kg/ha, pengendalian gulma 2 kali yaitu pada 7 – 14 HST dan 28 – 35 HST, pengendalian hama/penyakit dilakukan secara terpadu, panen tepat waktu dilakukan saat klobot dan rambut kering. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komponen biaya masih lebih besar dibanding keuntungan walaupun tidak berbeda jauh jumlahnya, (biaya = 56,45 % sedangkan keuntungan 43,54 %). Hal ini mengindikasikan bahwa biaya bersifat sangat penting dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pengembangan, titik impas produksi introduksi = 1.702,5 kg/ha (tanpa dipupuk) ; dipupuk = 2.012,5 kg/ha, sedangkan titik impas harga dicapai pada Rp. 174,17 kg (tanpa dipupuk) dan Rp. 185,06 /kg. Sedangkan untuk dapat bersaing dengan teknologi lainnya besarnya harga dan produksi minimal yang harus dicapai adalah 4.040 kg/ha (terhadap produksi pada tanpa dipupuk), 2.437,75 kg/ha (terhadap produksi petani) serta Rp. 371,49 /kg (terhadap harga pada tanpa dipupuk), Rp. 224,16 (terhadap petani). Untuk sensitivitas kenaikan harga mampu memberikan keuntungan terbesar yang mencapai Rp. 1.109.000 (dipupuk).

Kata kunci : Jagung, Finansial, Usahatani, petani, Teknologi.

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Sampai saat ini jagung dikenal sebagai salah satu komoditas tanaman pangan yang sangat penting bagi masyarakat setelah padi. Komoditas ini dibutuhkan sebagai sumber bahan makanan sehari-hari juga bahan baku industri terutama makanan dan pakan ternak. Untuk makanan sehari-hari dikonsumsi dalam bentuk biji dan olahan juga dalam bentuk lain seperti tongkol masih muda yang dibuat sayur (*baby corn*) sedangkan untuk industri yaitu industri minyak makan, pati dan minuman seperti bir. Untuk limbah berupa janggol (*corn cob*) dijadikan bahan baku industri kimia dan pembersih/pengkilap kulit (semir), kayu (pelitur), dan logam (Amerikan Society of Agronomy, 1977 dalam Nasib dan Darsana, 1993).

Seiring dengan perkembangan industri, usaha pakan ternak memiliki tingkat permintaan yang sangat tinggi. Besarnya serapan dari sektor jenis usaha tersebut mencapai 35 % dari total produksi Nasional. (Puslitbangtan, 1988. dalam Nasib dan Darsana, 1993).

Mengantisipasi kondisi ini maka pemerintah telah bertekad mengembangkan usahatani komoditas ini terutama keluar pulau Jawa yang selama ini dikenal sebagai sentra produksi terbesar dalam upaya mencukupi kebutuhan nasional dan ketidakseimbangan antara permintaan dan ketersediaan.

Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu daerah sasaran pengembangan. Daerah ini dianggap potensial karena memiliki potensi lahan kering yang cukup luas serta masih dominannya peran komoditas ini terhadap kelangsungan hidup masyarakat lokal dalam menjadikan sebagai sumber bahan makanan sehari-hari bagi petani di pedesaan yang sampai saat ini masih cukup dominan mengkonsumsi langsung baik dalam bentuk biji maupun diolah. Bahkan sangat berperan terhadap kehidupan masyarakat yang ditandai dengan seringnya komoditas ini diikutsertakan sebagai salah satu jenis makanan pokok dalam setiap aktivitas sosial budaya dan keagamaan.

Berdasarkan perkembangannya produktivitas hasil yang dicapai daerah ini masih sangat rendah yaitu hanya sebesar 1,64 t/ha (BPS, 1996). Kondisi ini relatif tertinggal dibanding produktivitas nasional sebesar 2,26 t/ha (Subandi *et al.*, 1994). Padahal peningkatan hasil masih memungkinkan dengan penerapan teknologi budidaya yang baik, diantaranya dapat dilakukan melalui penggunaan varietas unggul (Subandi dan Manwan, 1990) pemupukan, pengaturan populasi tanaman, perlindungan tanaman secara terpadu serta penanganan panen dan pasca panen yang tepat ((Sudaryono, *et al.*, 1996).

Penyebab rendahnya produktivitas yang dihasilkan antara lain (Mink, 1994 dan Subandi, 1990 dalam Sudjana dan Setiyono, 1996) adalah : (1). Belum berkembangnya pemakaian varietas unggul dan benih berkualitas, (2). Sekitar 34 % areal tanam masih menerapkan tumpangsari, (3). Sebagian besar petani masih menggunakan varietas lokal yang berdayahasil rendah, (4). Sekitar 75 % areal tanam berada di lahan masam, lahan tegalan, dan sawah tadah hujan serta (5). Teknik budidaya masih sederhana. Sedangkan menurut Subandi, (1994) salah satu penyebabnya adalah lemahnya pemilikan modal petani terutama kemampuan membeli sarana pendukung produksi. Oleh sebab itu mengacu dari kendala tersebut maka perlu diadakan penelitian yang terkait dengan aspek pemilikan finansial petani.

b. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui faktor share dan kompensasi pengelolaan
2. Mengetahui titik impas harga dan produks
3. Mengetahui tingkat kompetitif antar model usahatani yang dikembangkan
4. Mengkaji dampak perubahan beberapa komponen terhadap produktivitas usahatani.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian pengembangan ini dilaksanakan selama empat bulan dari bulan Desember 1997 sampai dengan bulan Maret 1998 di Kecamatan Amanuban Timur Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).

Lokasi penelitian di 10 desa dengan melibatkan sebanyak 1.008 petani. Teknologi yang diintroduksikan terdiri atas dua model yaitu : Petani dan Introduksi. Untuk introduksi terbagi menjadi dua model yaitu : 1. tidak dipupuk 2. dipupuk. Komponen yang diintroduksikan untuk dipupuk adalah : varietas Bisma, Dosis pupuk urea dan SP 36 yaitu : 200 kg/ha dan 100 kg/ha, pengendalian gulma 2 kali yaitu pada 7 – 14 HST dan 28 – 35 HST, pengendalian hama/penyakit dilakukan secara terpadu, panen tepat waktu dilakukan saat klobot dan rambut kering.

Pengumpulan data dilakukan melalui pencatatan usahatani (*farm record keeping*) yang dilakukan secara periodik dan wawancara menggunakan pertanyaan terstruktur (*Kuesioner*).

Data yang dikumpulkan adalah harga sarana produksi seperti bibit, pupuk, tenaga kerja (dalam dan luar keluarga), obat-obatan dan bunga (modal) yang diperhitungkan selama empat bulan. Analisis data dilakukan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Faktor share dan kompensasi Pengelolaan

Berdasarkan hasil penelitian (Tabel 1) terlihat hanya terdapat tiga jenis faktor produksi (saproton) yang digunakan yaitu bibit, pupuk dan tenaga kerja.

Proporsi share bibit lebih rendah dibanding pupuk dan tenaga kerja. Besarnya proporsi umumnya berada dibawah empat persen yaitu 3,20 % (tanpa dipupuk), 2,87 % (1/2 dipupuk) dan 1,22 % (petani) sedangkan pemupukan walaupun hanya digunakan pada pola ½ dipupuk tetapi mampu memberikan proporsi yang lebih tinggi dibanding bibit yaitu sebesar 4,61 %. Untuk tenaga kerja umumnya memiliki proporsi share yang paling tinggi dibanding benih dan pupuk dengan masing-masing sebesar 53,26 % (tanpa dipupuk) diikuti 46,26 % (1/2 dipupuk) dan 92,14 % (petani).

Dari komposisi share yang telah dihasilkan diatas nampak bahwa tenaga kerja merupakan jenis saproton yang sangat penting karena memiliki komposisi volume pembiayaan terbesar dibanding jenis saproton benih dan pupuk. Hal ini menunjukkan bahwa jenis saproton tersebut memiliki peran yang sangat besar terhadap keberhasilan pelaksanaan usaha.

Untuk share komponen produksi antara pembiayaan dan keuntungan terlihat bahwa pembiayaan memiliki komposisi yang lebih besar dibanding keuntungan dengan kisaran 56,46 % (tidak dipupuk), 53,74 % (dipupuk) dan 93,36 % (petani). Dari hasil ini nampak bahwa walaupun ½ dipupuk menggunakan biaya yang paling besar (Rp. 935.000) tetapi model ini paling produktif. Hal ini karena mampu memberikan hasil 4.350 t/ha.

Penampilan tersebut menunjukkan bahwa model aplikasi yang dikembangkan di wilayah ini cenderung sangat sederhana karena minim aplikasi saproton serta rendahnya dosis pupuk yang diaplikasi (maksimal hanya ½ dosis anjuran).

Faktor Share sangat penting dijadikan indikator karena terkait dengan pemilikan finansial yang selama ini dikenal sebagai kendala dominan dan bersifat spesifik terhadap petani di lahan kering wilayah ini.

Mengacu dari hasil ini maka dapat dikatakan bahwa untuk memperoreh alternatif produktivitas hasil yang maksimal dapat dilakukan melalui optimalisasi tenaga kerja. Hal ini sangat penting karena penggunaan jenis saproton ini tidak membutuhkan pembiayaan yang bersifat tunai terutama apabila pekerjaan dilakukan oleh tenaga kerja dalam keluarga dan di lingkungannya sendiri.

Kegunaan faktor share adalah untuk mengevaluasi perbandingan komposisi besarnya penggunaan masing-masing saproton dan komponen produksi sedangkan kompensasi pengelolaan adalah gambaran besarnya imbalan management petani sebagai dampak dari penggunaan model pengelolaan usaha yang dilakukan (Djamhuri, *et al.* 1997).

Tabel 1. Faktor share dan kompensasi pengelolaan pengembangan usahatani jagung di Kecamatan Amanuban Timur

Komponen	Teknologi					
	A	Share	B	Share	C	Share
Produktivitas	3.910	-	4.350	-	1.510	-
Penerimaan	1.564.000	100	1.740.000	100	604.000	100
Biaya :	883.000	56,46	935.000	53,74	563.900	93,36
- Bibit	50.000	3,20	50000	2,87	7.400	1,22
- Pupuk	-	-	80000	4,61	-	-
- Tenaga Kerja	833.000	53,26	805.000	46,26	556.5000	92,14
Keuntungan	681.000	43,54	805.000	46,26	40.100	6,64

Sumber : Data Primer

b. Titik Impas Produksi dan Harga

Produktivitas dan harga minimal yang dicapai untuk mampu menutupi semua biaya pengeluaran seperti tersaji dalam Tabel 3.

Hasil analisis menunjukkan bahwa TIP dicapai pada 1.702,5 kg (tanpa dipupuk) ; 2.012,5 kg (1/2 dosis) ; dan 100,5 kg (petani) sedangkan TIH dicapai pada Rp. 174,17 (tanpa dipupuk) ; Rp. 185,06 (1/2 dosis) dan Rp. 126,56 (petani).

Kedua hasil analisis ini penting untuk dipedomani karena hasil tersebut dapat dijadikan acuan bagi petani didalam menilai keberhasilan pelaksanaan usaha terutama kemampuan pengembalian keseluruhan biaya yang telah dikeluarkan supaya tidak mengalami kerugian (titik impas/*break even point*).

Tabel. 2. TIH dan TIP pengembangan jagung di Kecamatan Amanuban Timur.

Teknologi	Titik Impas	
	Produksi (Kg)	Harga (Rp)
Tanpa di pupuk	1.702,5	174,17
½ dipupuk	2.012,5	185,06
Petani	100,25	26,56

Sumber : Data Primer

c. Tingkat Kompetitif

Hasil analisis (Tabel 3) terlihat bahwa ½ dipupuk mampu memberikan tingkat kompetitif yang terbaik. Hal ini terlihat dari tingkat produksi dan harga yang berada di bawah produksi dan harga aktual.

Untuk mampu kompetitif terhadap 1/2 dipupuk maka tanpa dipupuk dan petani harus mampu menghasilkan produksi minimal masing-masing sebesar 4.220 kg dan 3.422,25 kg sedangkan harga minimal yang harus diterima petani supaya tanpa dipupuk dan petani mampu kompetitif harus menghasilkan harga jual minimal Rp. 431,7/kg dan Rp. 905,96/kg. Dengan kata lain bahwa untuk memperoleh produksi dan harga kompetitif maka produktivitas dan harga jual harus ditingkatkan minimal sebesar 7,93 % (dipupuk) dan 126,64 % (petani).

Kaitannya dengan harga kesepakatan yang dilakukan antara petani dengan P.T. Monagro sebagai mitra penyedia benih maka petani pelaksana ½ dosis pemupukan memiliki kemampuan yang paling besar untuk mengembalikan kredit yang dilakukan setelah panen (yarnen). Hal ini terlihat dari besarnya produksi yang dihasilkan berada dibawah harga kesepakatan (Rp. 400 /kg).

Tabel. 3 TIH dan TIP pengembangan jagung di Kecamatan Amanuban Timur.

Teknologi	Produksi (kg)	Harga (Rp)	Biaya Produksi (Rp)	Keuntungan (Rp)
Tanpa di pupuk	3.910	400	883.000	681.000
½ dipupuk	4.350	400	935.000	805.000
Petani	1.510	400	563.000	40.000
	Produksi Minimal (Kg/ha)		Harga Minimal (Rp/kg)	
Tanpa di pupuk terhadap :				
- ½ dipupuk		4.220		431,7
- Petani		2307,75		236,1
½ dipupuk terhadap :				
- Tanpa dipupuk		4040		71,49
- Petani		2.437,75		224,16
Petani terhadap :				
- Tanpa dipupuk		3.112,25		286,18
- ½ dipupuk		3.422,25		905,96

Sumber : Data Primer

d. Analisis Sensitivitas

Kegunaan analisis ini adalah untuk menilai seberapa besar dampak perubahan beberapa indikator terhadap produktivitas usahatani. Parameter yang dijadikan pembanding adalah biaya produksi dan harga jual.

Hasil analisis (Tabel 4) menunjukkan bahwa kenaikan harga jual mampu memberikan produktivitas terbaik. Hal ini ditunjukkan dengan kenaikan harga jual sebesar 10 % diperoleh keuntungan Rp. 1.109.000. Besarnya keuntungan tersebut lebih tinggi dibanding model lain pada kenaikan harga jual yang sama yaitu Rp 837.400 (tanpa dipupuk) dan 107.000 (petani). Sebaliknya kenaikan biaya produksi dan penurunan harga jual memberikan produktivitas terendah terutama pada model petani yang mengalami kerugian sebesar Rp.12.900 (harga jual turun) dan Rp. 16.290 (biaya produksi naik).

Tabel. 4 Analisis Sensitivitas pengembangan Jagung di Kecamatan Amanuban Timur.

Komponen	Satuan	Teknologi		
		Tanpa dipupuk	½ dipupuk	Petani
Skenario I				
Produktivitas	Kg	3.910	4.350	1.510
Penerimaan	Rp	1.564.000	1.740.000	604.000
Biaya	Rp	971.300	1.028.500	620.290
Keuntungan	Rp	592.700	711.500	-16.290
TIP	Kg	2.428,25	2.571,25	1.550,73
TIH	Rp	248,14	236,44	410,79
Skenario II				
Produktivitas	Kg	3.910	4.350	1.510
Penerimaan	Rp	1.720.400	1.914.000	664.400
Biaya	Rp	883.000	805.000	556.500
Keuntungan	Rp	837.400	1.109.000	107.900
TIP	Kg	2.006,82	1.829,55	1.264,77
TIH	Rp	225,83	185,06	268,54
Skenario III				
Produktivitas	Kg	3.910	4.350	1.510
Penerimaan	Rp	1.407.600	1.566.000	543.600
Biaya	Rp	883.000	805.000	556.500
Keuntungan	Rp	524.600	761.000	-12.900
TIP	Kg	2.452,78	2.236,11	1.545,83
TIH	Rp	225,83	185,06	368,54
Skenario IV				
Produktivitas	Kg	3.519	3.915	1.359
Penerimaan	Rp	1.407.600	1.566.000	543.600
Biaya	Rp	883.000	805.000	556.500
Keuntungan	Rp	524.600	761.000	-12.900
TIP	Kg	2.207,5	2.012,5	409,49
TIH	Rp	250,92	205,62	

Sumber : Data Primer

KESIMPULAN

1. Komponen share biaya mencapai 56,45 % sedangkan keuntungan 43,54 % yang menunjukkan bahwa biaya dan keuntungan memiliki komposisi kompensasi pengelolaan yang hampir berimbang.
2. Titik impas produksi introduksi = 1.702,5 kg/ha (tanpa dipupuk) ; dipupuk = 2.012,5 kg/ha, sedangkan titik impas harga dicapai pada Rp. 174,17 kg (tanpa dipupuk) dan Rp. 185,06 /kg.
3. ½ dipupuk memberikan tingkat kompetitif yang terbaik
4. Untuk sensitivitas kenaikan harga mampu memberikan keuntungan terbesar yang mencapai Rp. 1.109.000 (dipupuk).

DATAR PUSTAKA

- BPS. 1996. Nusa Tenggara Timur dalam angka. Kantor Statistik Propinsi Nusa Tenggara Timur.
- Djamhuri, Helena da Silva, Abdullah Bamualim. 1997. Dimensi sumberdaya manusia dan pertanian di kawasan selatan Timor Timur. (belum dipublikasi).
- Subandi, Bambang Murdolelono, Bambang Pikukuh, T. Basuki,. 1994. Teknologi budidaya jagung pada lahan kering di Nusa Tenggara Timur. Makalah disampaikan pada Rapat koordinasi pembinaan teknologi Propinsi Tkt. I Nusa Tenggara Timur. Kupang 9 Agustus 1995
- Sudaryono, A. Taufik, dan S. Prayitno. 1996. Teknologi budidaya jagung untuk lahan kering di Jawa Timur.
- Sudjana,. A. dan R. Setiyono, 1996. Jagung untuk lahan sawah tadah hujan. Kinerja Penelitian Tanaman Pangan. Prosiding Simposium Penelitian Tanaman Pangan III. Jakarta/Bogor, 23 – 25 Agustus 1993

KINERJA PEMBANGUNAN PERTANIAN NTB 2003

Irianto Basuki, Andri Nurwati, Kukuh Wahyu¹, dan Sri Hastuti S¹
Peneliti dan Penyuluh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian NTB

ABSTRAK

Pembangunan pertanian di Nusa Tenggara Barat (NTB) dihadapkan pada berbagai kompleksitas dinamika dan keanekaragaman permasalahan teknis, sosial, ekonomi, dan budaya sehingga dalam implementasinya perlu adanya indikator yang mengukur keberhasilannya. Permasalahan utama untuk mengetahui keberhasilan pembangunan pertanian dewasa ini adalah sulitnya memperoleh informasi indikator pembangunan pertanian secara cepat dan akurat, sehingga untuk itu diperlukan suatu kegiatan dan perangkat yang mampu menjawabnya. Pendekatan pengkajian ini dilakukan melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan metode survai. Tujuan kegiatan pengkajian ini adalah mengevaluasi kinerja pembangunan pertanian di NTB berdasarkan indikator-indikator pembangunan pertanian. Keluaran yang diharapkan dari kegiatan pengkajian ini antara lain adalah hasil evaluasi kinerja pembangunan pertanian berdasarkan indikator-indikator pembangunan pertanian. Hasil kajian menunjukkan bahwa : 1. Secara umum selama dua tahun (2001-2002) pengamatan, terjadi kecenderungan penurunan harga komoditas pertanian, sedangkan harga sarana produksi dan upah pertanian cenderung meningkat, 2. Dalam kurun waktu 1999-2002 secara umum telah terjadi kenaikan PDRB dengan laju pertumbuhan rata-rata 13,83 persen pertahun. Pertumbuhan yang cepat terjadi pada sektor pertambangan (rata-rata 190,39 %/tahun), 3. Pada tahun 1998, sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar dalam PDRB Propinsi NTB. Sejak tahun 2000 peranan sektor pertanian sebagai menyumbang PDRB terbesar digantikan oleh sektor pertambangan, 4. Produksi gabah Propinsi NTB pada tahun 2002 mencapai 1370 ribu ton yang dihasilkan dari 311 ribu Ha areal panen, 5. Secara umum ketahanan pangan wilayah Nusa Tenggara Barat dilihat dari ketersediaan beras, cukup tinggi, 6. NTP bulanan tahun 2002 dari bulan Januari-Desember dibawah 100 dengan kisaran antara 83-92, 7. Pendapatan rumahtangga petani berbagai komoditas sangat bervariasi. Rata-rata pendapatan per kapita sebulan sebesar Rp 551110, jauh di atas batas kemiskinan BPS.

Kata kunci : kinerja, pembangunan, pertanian

PENDAHULUAN

Sektor pertanian di Indonesia masih merupakan sektor penting dan strategis karena potensi sumberdaya alam, kontribusinya dalam menyerap tenaga kerja, dan ketahanannya dalam menghadapi gejolak dan krisis ekonomi. Selain itu, sektor pertanian adalah sektor yang sumberdaya alamnya dapat diperbaharui (*renewable*) seperti tanaman, ternak, dsb, sehingga kontinuitasnya sangat diandalkan dalam mendukung Produk Domestik Bruto (PDB) dan sebagai andalan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan posisi Indonesia yang masih masuk katagori negara sedang berkembang dengan jumlah penduduk yang sangat besar, upaya-upaya pembangunan sektor pertanian masih ditujukan untuk memantapkan swasembada pangan dan mengembangkan agribisnis. Untuk itulah Departemen Pertanian berupaya keras mewujudkan pembangunan pertanian dengan mengerahkan segenap kekuatan aparat dan institusinya baik di pusat maupun di daerah.

Upaya untuk mendukung pembangunan sektor pertanian di daerah diwujudkan dengan mendirikan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) di seluruh provinsi di Indonesia. Pada dasarnya BPTP mempunyai tugas dan fungsi untuk merakit teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi dan mendiseminasikannya kepada para pengguna. Namun demikian, dalam aspek yang lebih luas, BPTP merupakan pilar pembangunan pertanian daerah yang dirancang untuk memecahkan masalah-masalah pembangunan di daerah, mencari solusi, dan memberikan saran kepada pengambil kebijakan (Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat) mengenai kebijakan pembangunan ke depan.

Dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsinya membangun daerah, BPTP perlu melakukan pengumpulan data, informasi, potensi dan masalah, menganalisis dan memecahkan permasalahan, memberikan solusi, termasuk saran-saran bagi pengambil kebijakan. Oleh karena itu lingkup kegiatan BPTP menjadi lebih luas, tidak hanya menangani hal-hal yang bersifat teknologi, tetapi aspek-aspek sosial-ekonomi dan kebijakan pembangunan pertanian juga menjadi perhatian, karena hal-hal tersebut saling berkaitan satu sama lainnya.

METODA PENELITIAN

Lokasi dan Pengumpulan Data

Kegiatan pengkajian ini dilakukan di Wilayah Pembangunan Pertanian NTB yang meliputi Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Kegiatan ini dilaksanakan mulai bulan Juni hingga Desember 2003. Data yang dikumpulkan terdiri dari data sekunder dan data primer.

(1) Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran secara makro dan komprehensif mengenai sektor pertanian di NTB. Adapun jenis data yang dikumpulkan meliputi : 1. Harga output komoditas utama, yaitu harga produsen serta jenisnya (Rp/kg), 2. Harga input komoditas utama, yaitu harga sarana produksi (Rp/kg) dan upah tenaga kerja (Rp/HOK), 3. PDRB sektoral, 4. Ketahanan Pangan, meliputi produksi dan ketersediaan pangan pokok, serta tingkat ketahanan pangan, 5. Nilai tukar petani.

(2) Pengumpulan Data Primer

Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara pada petani responden. Penentuan petani responden dilakukan dengan cara *purposive sampling*, yaitu mengambil petani yang berusahatani berbasis komoditas unggulan pada daerah sentra produksi komoditas yang bersangkutan sehingga diharapkan dapat menggambarkan kondisi usahatani masing-masing komoditas yang dianalisa. Setiap komoditas utama diambil 15 petani sampel dengan ketentuan terdiri dari kelas penguasaan lahan untuk petani yang mengusahakan tanaman (lahan sempit, sedang dan luas), atau berbasis pemilikan ternak (sedikit, sedang, dan banyak). Jenis data yang dikumpulkan terdiri dari pendapatan dan pengeluaran rumah tangga petani masing-masing komoditas.

Metoda Analisis

Data dan informasi dianalisis secara agregasi dan lintas kabupaten maupun agroekosistem sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Analisis data dan informasi indikator pembangunan pertanian menggunakan statistika deskriptif misalnya, rata-rata, pertumbuhan/trend dan lain-lain

HASIL DAN PEMBAHASAN

Harga Output dan Input Pertanian

Harga output yang diterima petani maupun harga input yang dibayar oleh petani sangat menentukan besarnya tingkat keuntungan usahatani. Secara umum selama dua tahun pengamatan, terjadi kecenderungan penurunan harga komoditas pertanian, sedangkan harga sarana produksi dan upah pertanian cenderung meningkat. Berikut ini akan dibahas perkembangan harga output dan input pertanian yang terjadi di Propinsi NTB.

Harga Output Pertanian

Sesuai dengan cakupan penelitian dan ketersediaan data di BPS, analisa data harga produksi pertanian dibatasi pada 7 (tujuh) komoditas unggulan wilayah. Komoditas tersebut adalah kacang tanah dan kedelai (tanaman pangan), bawang merah dan cabe rawit (sayur-sayuran), pisang (buah-buahan), kelapa (perkebunan) dan sapi potong (peternakan). Pada Tabel 1 dapat dilihat perkembangan harga komoditas pertanian unggulan Propinsi NTB.

Tabel 1. Perkembangan Harga Komoditas Pertanian di Propinsi Nusa Tenggara Barat, 2001-2002

Komoditas	Rata-rata harga (Rp/100 kg)		Perubahan (%)
	2001	2002	
1. Kacang hijau	471529	408924	-13,28
2. Kedelai	288409	278229	-3,53
3. Bawang merah	931250	552056	-40,72
4. Cabai rawit	586910	912500	55,48
5. Pisang*)	-	3094	-
6. Kelapa**)	147280	91738	-37,71
7. Sapi potong***)	1068750	1976042	84,89

Sumber : BPS Propinsi NTB, 2003

Keterangan : *) dalam Rp/sisir, **) dalam Rp/100 butir, ***) dalam Rp/ekor

Dari tahun 2001 sampai 2002 terjadi penurunan harga pada sebagian besar komoditas pertanian yang dianalisa. Penurunan harga terjadi pada komoditas kacang hijau, kedelai, bawang merah dan kelapa. Bahkan pada komoditas bawang merah dan kelapa, mengalami penurunan harga yang sangat drastis yaitu sekitar 40 persen.

Sementara itu pada kurun waktu yang sama, kenaikan harga yang tinggi terjadi pada komoditas cabai rawit dan sapi potong. Perubahan harga tertinggi pada komoditas sapi potong yaitu mencapai 84,89 persen dari harga Rp 1068750/ekor pada tahun 2001 menjadi Rp 1976042 pada tahun 2002.

Harga Input Pertanian

Input produksi pertanian dipisahkan menjadi dua yaitu sarana produksi dan tenaga kerja. Sarana yang diperlukan dalam produksi pertanian diantaranya pupuk dan alat pertanian yang semuanya harus dibeli oleh petani. Sementara itu tenaga kerja diperlukan dalam kegiatan usahatani dan nilai tukar dari tenaga kerja yang dijual kepada orang lain dalam bentuk upah tenaga kerja. Berikut perkembangan harga sarana produksi dan upah tenaga kerja pertanian (Tabel 2).

Tabel 2. Perkembangan Harga Keperluan Produksi dan Upah Pekerja Pertanian di Propinsi Nusa Tenggara Barat, 2001-2002

Komoditas / Jenis Pekerjaan	Rata-rata Harga/Upah (Rp)		Perubahan (%) (%)
	2001	2002	
A. KEPERLUAN PRODUKSI			
1. Pupuk Urea	1361	1420	4,34
2. Pupuk TSP	2160	2162	0,09
3. Pupuk ZA	1773	2350	32,54
4. Nampan/Nyiru	3654	3876	6,08
5. Arit dengan gagang*)	4937	4073	-17,50
6. Cangkul pabrik*)	33172	30565	-7,86
7. Karung goni*)	1776	2105	18,53
b. UPAH PEKERJAAN**)			
1. Mencangkul	9463	10110	6,84
2. Menanam	8076	8582	6,27
3. Merambat	7303	7876	7,85
4. Memanen	9669	10502	8,62
5. Garu dan Ternak	30167	31233	3,53
6. Bajak	11032	13918	26,16

Sumber : BPS Propinsi NTB, 2003

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa harga-harga sarana produksi cenderung meningkat. Kenaikan harga tertinggi terjadi pada pupuk ZA yaitu 32,54 persen dari harga Rp 1773/kg pada tahun 2001 menjadi Rp 2350/kg pada tahun 2002.

Meskipun harga sarana produksi cenderung meningkat, harga arit dan cangkul justru menurun. Hal ini disebabkan sifat dari kedua barang tersebut yang relatif awet, sehingga frekuensi pembeliannya sangat jarang.

Perkembangan upah (terutama upah riil) merupakan indikator yang sangat penting mengingat indikator ini tidak hanya merefleksikan faktor-faktor yang mempengaruhi upah dan harga, tetapi yang lebih penting lagi perkembangan tingkat upah merefleksikan perubahan kesejahteraan tenaga kerja. Upah dalam kegiatan pertanian dibedakan menjadi upah mencangkul, menanam, merambat, memanen, garu dan bajak. Dalam analisa ini, upah pekerja merupakan upah nominal (bukan upah riil) artinya belum dibobot dengan pembobot misalnya harga gabah.

Dari tahun 2001-2002, terjadi kecenderungan peningkatan upah tenaga kerja pertanian dengan kisaran kenaikan 3,53 persen sampai 26,16 persen. Peningkatan upah tertinggi pada pekerjaan membajak. Hal ini ada kaitannya dengan semakin menurunnya populasi sapi sebagai tenaga kerja untuk membajak.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yaitu dari pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Perkembangan PDRB Propinsi NTB selama empat tahun (1999-2002) dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Perkembangan PDRB Propinsi Nusa Tenggara Barat Atas Dasar Harga Konstan 1993 menurut Lapangan Usaha, 1999-2002 (milyar rupiah)

Lapangan Usaha	1999	2000	2001	2002	Pertumbuhan (%)
1. Pertanian	1205,2	1211,3	1219,3	1235,3	0,82
a. Tanaman Pangan	787,7	769,2	771,3	778,5	-0,38
b. Tanaman Perkebunan	104,5	115,5	110,8	113,0	2,84
c. Peternakan	147,1	155,4	160,2	165,2	3,93
d. Kehutanan	46,8	45,9	51,6	50,4	2,73
e. Perikanan	119,2	125,3	125,4	128,2	2,48
2. Pertambangan dan Penggalian	169,6	1084,7	1379,2	1442,6	190,39
3. Industri Pengolahan	163,4	173,8	183,7	194,5	5,99
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	18,0	19,3	20,3	21,1	5,38
5. Bangunan	258,1	271,5	283,6	296,6	4,75
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	538,1	548,9	582,7	615,8	4,62
7. Pengangkutan dan Komunikasi	402,6	423,7	445,1	471,1	5,38
8. Keuangan, Persewaan Bangunan & Jasa Persh.	77,1	78,3	86,2	91,0	5,76
9. Jasa-jasa	566,3	565,8	570,6	579,0	0,74
Jumlah	3398,4	4377,2	4770,7	4946,9	13,83

Sumber : BPS, 2003

Dalam kurun waktu tersebut (1999-2002) secara umum telah terjadi kenaikan PDRB dengan laju pertumbuhan rata-rata 13,83 persen pertahun. Pertumbuhan yang cepat terjadi pada sektor pertambangan (rata-rata 190,39 %/tahun). Hal ini terjadi karena mulai dibangunannya tambang emas dan tembaga PT Newmont di Pulau Sumbawa. Lonjakan pertumbuhan PDRB subsektor pertambangan mulai terjadi tahun 2000. Sektor yang kurang berkembang dengan laju pertumbuhan terkecil terjadi pada sektor jasa-jasa.

Dibandingkan dengan sektor lain, dilihat dari nilai absolutnya, sektor pertanian menunjukkan pertumbuhan relatif kecil dengan laju pertumbuhan 0,82 persen pertahun. Pada umumnya sub sektor penyusun sektor pertanian mengalami pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan negatif terjadi pada subsektor tanaman pangan (rata-rata penurunan 0,38 persen).

Dengan melihat besarnya sumbangan masing-masing sektor terhadap PDRB, maka struktur ekonomi dapat diketahui. Sumbangan masing-masing sektor penyusun PDRB dapat disimak pada Tabel 4.

Tabel 4. *Persentase PDRB Propinsi Nusa Tenggara Barat Atas Dasar Harga Konstan 1993 menurut Lapangan Usaha, 1999-2002 (persen)*

Lapangan Usaha	1999	2000	2001	2002	Pertumbuhan (%)
1. Pertanian	35,46	27,67	25,56	24,97	-10,64
a. Tanaman Pangan	23,18	17,57	16,17	15,74	-11,62
b. Tanaman Perkebunan	3,07	2,64	2,32	2,28	-9,25
c. Peternakan	4,33	3,55	3,36	3,34	-7,99
d. Kehutanan	1,38	1,05	1,08	1,02	-8,83
e. Perikanan	3,51	2,86	2,63	2,59	-9,32
2. Pertambangan dan Penggalian	4,99	24,78	28,91	29,16	137,99
3. Industri Pengolahan	4,81	3,97	3,85	3,93	-6,11
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	0,53	0,44	0,42	0,43	-6,74
5. Bangunan	7,59	6,20	5,94	6,00	-7,21
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	15,83	12,54	12,21	12,45	-7,16
7. Pengangkutan dan Komunikasi	11,85	9,68	9,33	9,52	-6,61
8. Keuangan, Persewaan Bangunan & Jasa Persh	2,27	1,79	1,81	1,84	-6,09
9. Jasa-jasa	16,66	12,93	11,96	11,70	-10,68
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	-

Sumber : BPS, 2003

Dari tabel tersebut terlihat bahwa telah terjadi pergeseran urutan sektor penyumbang PDRB terbesar. Pada tahun 1998, sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar dalam PDRB Propinsi NTB. Sejak tahun 2000 peranan sektor pertanian sebagai menyumbang PDRB terbesar digantikan oleh sektor pertambangan. Sampai dengan tahun 2003, sektor pertambangan masih memegang peranan penting dalam pembangunan NTB. Sektor keuangan, persewaan bangunan dan jasa perusahaan merupakan sektor usaha yang paling sedikit peranannya dalam menyusun PDRB (sekitar 2 %).

Pada tahun 1999, sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB sebesar 35,46 persen dan merupakan penyumbang terbesar pada pembentukan PDRB total, sehingga dapat dikatakan bahwa struktur perekonomian NTB masih didominasi oleh sektor pertanian. Dari tahun ke tahun besarnya pangsa sektor pertanian cenderung menurun (walaupun nilai absolutnya meningkat) dengan rata-rata laju pertumbuhan -10,64 persen per tahun. Di dalam sektor pertanian, penurunan terbesar terjadi pada subsektor tanaman pangan.

Pergeseran struktur perekonomian yang terjadi sejak tahun 2000 dari dominasi sektor pertanian menjadi dominasi sektor pertambangan, berakibat pada turunnya sumbangan semua sektor terhadap PDRB kecuali pada sektor pertambangan terjadi peningkatan. Pada tahun 1999 sumbangan sektor pertambangan terhadap PDRB total sebesar 4,99 persen, pada tahun 2002 meningkat menjadi 29,16 persen.

Ketahanan Pangan

Untuk mengetahui ketahanan pangan wilayah didekati dari analisa ketersediaan padi/beras. Pemilihan beras sebagai komoditas untuk mengukur ketahanan pangan karena beras merupakan makanan pokok sebagian besar penduduk. Sehingga apabila ketersediaan beras terpenuhi maka diharapkan ketahanan pangan masyarakat tersebut juga tinggi (terjamin). Analisa ketersediaan padi selengkapnya disajikan pada Tabel 5.

Produksi gabah Propinsi NTB pada tahun 2002 mencapai 1370 ribu ton yang dihasilkan dari 311 ribu Ha areal panen. Setelah dikurangi susut sebesar 274 ribu ton maka diperoleh ketersediaan gabah sebanyak 1096 ribu ton atau setara dengan 691 ribu ton beras. Dengan tingkat konsumsi 133,9

kg/kapita/tahun, maka kebutuhan beras untuk konsumsi sebesar 533 ribu ton. Dengan demikian berdasarkan data produksi tahun 2002, diperkirakan terdapat kelebihan/surplus beras di Propinsi NTB sebesar 157 ribu ton.

Tabel 5. Analisa Ketersediaan Padi/Beras berdasarkan Luas Panen dan Produksi Angka Sementara 2002 dan Proyeksi Penduduk Tahun 2003 di Propinsi Nusa Tenggara Barat

Kabupaten/ Kota	Luas Panen (Ha)	Produksi GKP (Ton)	Ketersediaan (Ton)			Jumlah Penduduk (Orang)	Kebutuhan Beras (Ton)	Surplus Beras (Ton) (+) (-)
			Susut	GKP	Beras			
Kota Mataram	5021	24.152	4.830,4	19.321,6	12.172,6	32.9149	44.073,05	(31.900,45)
Lombok Barat	3.7168	169.379	33.875,8	135.503,2	85.367,0	69.2386	92.710,49	(7.343,49)
Lombok Tengah	7.5046	334.631	66.926,2	267.704,8	168.654,0	76.7450	102.761,56	65.892,45
Lombok Timur	5.4395	252.556	50.511,2	202.044,8	127.288,2	100.8536	135.042,97	(7.754,77)
Sumbawa	6.2853	278.834	55.766,8	223.067,2	140.532,3	46.7660	62.619,67	77.912,63
Dompu	2.7229	108.057	21.611,4	86.445,6	54.460,7	19.3610	25.924,38	28.536,32
Bima	4.9257	202.562	40.512,4	162.049,6	102.091,2	52.4328	70.207,52	31.883,68
NTB	31.0969	1.370.171	274.034,2	1.096.136,8	690.566,0	398.3119	533.339,63	157.226,37

Sumber : BUKPD Propinsi NTB, 2002

Keterangan : 1. Kolom 5 = kolom 4 x 20%, 2. Kolom 6 = kolom 4 – kolom 5
3. Kolom 7 = kolom 6 x 63%, 4. Kolom 9 = kolom 8 x 133,9 kg/kapita/tahun
5. Jumlah penduduk = berdasarkan SP 200 BPS NTB,
6. Surplus beras 157226,37 Ton (setara 249565,5 Ton GKG. atau 287000 Ton GKP)

Surplus beras tidak terjadi di semua kabupaten/kota. Kabupaten Lombok Tengah, Sumbawa, Dompu dan Bima termasuk daerah surplus beras. Defisit beras terjadi di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Timur. Hal ini terjadi antara lain karena : 1) sesuai dengan kondisi wilayahnya, komoditas utama yang daerah tersebut dihasilkan bukan padi, 2) jumlah penduduknya tinggi sehingga beras yang dihasilkan tidak mampu mencukupi kebutuhan. Bukan berarti ketahanan pangan di tiga kabupaten defisit beras tersebut rendah. Karena selain padi, ada komoditas lain yang dihasilkan dan adanya sumber pendapatan di luar pertanian, sehingga dari pendapatan tersebut dapat dipertukarkan dengan bahan pangan lainnya.

Dari hasil analisa yang dilakukan dapat dikatakan bahwa secara umum ketahanan pangan wilayah NTB dilihat dari ketersediaan beras, cukup tinggi. Ketersediaan pangan wilayah yang cukup, akan kurang berarti apabila akses rumahtangga maupun individu terhadap pangan rendah. Akses terhadap pangan mencakup akses fisik yang terkait dengan faktor penguasaan produksi pangan ditingkat rumahtangga, dan akses ekonomi atau daya beli pangan. Peranan pemerintah diperlukan agar ketahanan pangan wilayah dapat merata dinikmati oleh seluruh rumahtangga dan individu, diantaranya dalam mengatur distribusi pangan sehingga dapat dijangkau dari segi jarak dan daya beli.

Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani. Indikator NTP diperoleh dengan membandingkan indeks harga yang diterima petani (IT) terhadap indeks harga yang dibayar petani (IB). IT merupakan suatu ukuran perubahan harga yang terjadi pada harga rata-rata yang diterima petani untuk barang-barang yang dihasilkan. IB merupakan suatu ukuran perubahan harga yang terjadi pada harga rata-rata yang dibayar petani untuk barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumahtangganya maupun untuk biaya produksi pertaniannya (Erwidodo *et. al.*, 1993).

Perkembangan NTP di Propinsi NTB antara tahun 2000-2003 dapat dilihat pada Tabel 6. Dari tabel tersebut dapat dikatakan bahwa selama tiga tahun terakhir terjadi penurunan tingkat kesejahteraan petani. NTP tahun 2000 sebesar 87,17 turun menjadi 85,74 pada tahun 2002.

Tabel 6. Perkembangan Nilai Tukar Petani di Propinsi Nusa Tenggara Barat, 2000-2002 (1993=100)

Tahun	Indeks yang diterima (IT)	Indeks yang dibayar (IB)	Nilai Tukar Petani (NTP)
2000	327,28	375,55	87,17
2001	390,15	437,00	89,34
2002	461,19	537,55	85,74

Sumber : BPS Propinsi NTB, 2003

Perubahan NTP bulanan tahun 2002 di NTB disajikan pada Tabel 7. Bila diamati data NTP bulanan tahun 2002, maka tampak bahwa dari bulan Januari sampai Desember besaran NTP dibawah 100 dengan kisaran antara 83-92.. Dari bulan ke bulan pergerakan NTP fluktuatif, NTP terendah terjadi pada bulan Oktober yaitu sebesar 83,03. Perubahan NTP perbulannya berkisar antara -7,14 persen sampai 6,83 persen. Perubahan NTP negatif terjadi pada bulan Januari, Maret, Juni dan Oktober. Sementara pada bulan-bulan lainnya, NTP mengalami perubahan positif.

Tabel 7. Nilai Tukar Petani dan Perubahannya di Propinsi Nusa Tenggara Barat, Januari-Desember 2002 (1993=100)

Bulan	Indeks yang diterima (IT)	Indeks yang dibayar (IB)	Nilai Tukar Petani (NTP)	Perubahan NTP (%)
Januari	437,51	517,98	84,47	-3,13
Februari	457,31	522,94	87,45	3,53
Maret	448,54	532,64	84,21	-7,14
April	440,93	523,84	84,17	0,05
Mei	460,40	539,79	85,76	1,89
Juni	447,01	529,79	84,38	-1,61
Juli	452,27	534,73	84,58	0,24
Agustus	453,39	535,84	84,61	0,04
September	461,43	541,98	85,14	0,63
Oktober	449,62	540,85	83,03	-2,48
November	464,62	557,65	88,70	6,83
Desember	531,80	575,55	92,40	4,17

Sumber : BPS Propinsi NTB, 2002

Pendapatan dan Pengeluaran Rumahtangga Petani

Pendapatan rumahtangga petani di Propinsi NTB dapat dilihat pada Tabel 8. Dengan membandingkan pendapatan per kapita penduduk dan batas kemiskinan yang ditentukan oleh BPS, maka dapat diketahui apakah penduduk tersebut tergolong miskin.

Berdasarkan Tabel 8 dapat dikatakan bahwa pendapatan rumahtangga petani berbagai komoditas sangat bervariasi. Sebagai sumber pendapatan tidak hanya diperoleh dari usahatani, akan tetapi juga dari pendapatan pada kegiatan *off farm* dan kegiatan *non farm*. Apabila diamati struktur pendapatannya, sebagian besar pendapatan diperoleh dari usaha *on farm*. Sumber pendapatan kedua adalah dari kegiatan *non farm*, dan berikutnya terkecil dari kegiatan *off farm*.

Tabel 8. Pendapatan Rumahtangga Petani di Propinsi Nusa Tenggara Barat, 2002

Rumahtangga Petani	Pendapatan RT /tahun (Rp)				Pendapatan RT /bln Rp	Pendapatan per kapita (Rp)	
	On Farm	Off Farm	Non farm	Total		setahun	sebulan
1. Kacang hijau	7.482.467	466.667	513.333	8.462.467	705.206	2.115.617	176.301
2. Kedelai	15.839.677	333.600	70.827	16.244.103	1.353.675	4.061.026	338.419
3. Cabai	20.789.333	0	5.663.933	26.453.267	2.204.439	6.613.317	551.110
4. Bawang merah	10.110.183	178.000	3.300.000	13.588.183	1.132.349	3.397.046	283.087
5. Mangga	11.418.867	170.600	2.811.733	14.401.200	1.200.100	3.600.300	300.025
6. Pisang	790.833	0	110.000	900.833	75.069	225.208	18.767
7. Jambu Mete	2.994.150	60.000	912.933	3.967.083	330.590	991.771	82.648
8. Kelapa	1041833	0	92667	1134500	94542	283625	23635
9. Sapi	766667	60000	1320	827987	68999	206997	17250
10. Ayam buras	361541	24200	171380	557121	46427	139280	11607

Sumber : Data primer, diolah

Dari semua petani komoditas yang disurvei, petani cabai merupakan petani dengan pendapatan paling besar. Rata-rata pendapatan per kapita sebulan sebesar Rp 551110, jauh di atas batas kemiskinan BPS. Batas kemiskinan tahun 2001 yang ditentukan BPS untuk daerah pedesaan Propinsi NTB sebesar Rp 75062/kapita/bulan.

Pada Tabel 9 dapat dilihat pengeluaran petani selama setahun terakhir. Jika Tabel 8 dan Tabel 9 diamati, secara umum pengeluaran petani jauh lebih besar dibandingkan dengan pendapatannya.

Pengeluaran rumahtangga dalam analisa ini dikelompokkan menjadi pengeluaran pangan dan pengeluaran non pangan. Proporsi pengeluaran pangan terhadap total pengeluaran dapat digunakan untuk menentukan tingkat ketahanan pangan rumahtangga. Hubungan antara proporsi pengeluaran pangan dengan derajat ketahanan pangan berbanding terbalik. Semakin kecil proporsi pengeluaran pangan, berarti derajat ketahanan pangan rumahtangga tersebut semakin tinggi. Sebaliknya, semakin besar proporsi pengeluaran pangan, menunjukkan derajat ketahanan pangan yang rendah.

Pada semua rumahtangga petani, proporsi pengeluaran pangan relatif tinggi yaitu lebih dari 50 persen. Diantara petani contoh, petani kedelai paling rendah tingkat ketahanan pangannya yang ditunjukkan oleh tingginya proporsi pengeluaran pangannya (77,61 %).

Tabel 9. Pengeluaran Rumahtangga Petani Setahun Terakhir di Propinsi Nusa Tenggara Barat, 2002

Rumahtangga Petani	Pengeluaran Rumahtangga (Rp)					Pengeluaran per kapita (Rp)
	Pangan			Non Pangan	Total	
	Karbohidrat	Lainnya	Total			
1. Kacang hijau	147.8013	3.627.173	5.105.187	3834301	8939488	2234872
Proporsi (%)	16,53	40,57	57,11	42,89	100,00	
2. Kedelai	156.9218	13.169.709	14.738.927	4251644	18990571	4747643
Proporsi (%)	8,26	69,35	77,61	22,39	100,00	
3. Cabai	560.387	8.479.467	9039853	5483980	14523833	3630958
Proporsi (%)	3,86	58,38	62,24	37,76	100,00	
4. Bawang Merah	3.720.000	6.844.080	10564080	5904720	16468800	4117200
Proporsi (%)	22,59	41,56	64,15	35,85	100,00	
5. Mangga	1.757.860	3.013.289	4771149	3447244	8218393	2054598
Proporsi (%)	21,39	36,67	58,05	41,95	100,00	
6. Pisang	1.007.067	2.719.649	3726715	2150400	5877115	1469279
Proporsi (%)	17,14	46,28	63,41	36,59	100,00	
7. Jambu Mete	1.547.000	1.869.833	3416833	2030755	5447588	1361897
Proporsi (%)	28,40	34,32	62,72	37,28	100,00	
8. Kelapa	1.142.800	2.502.600	3645400	1496673	5142073	1285518
Proporsi (%)	22,22	48,67	70,89	29,11	100,00	
9. Sapi	1.393.773	3373760	4767533	5104734	9872267	2468067
Proporsi (%)	14,12	34,17	48,29	51,71	100,00	
10. Ayam Buras	2.217.800	4361221	6579021	4854122	11433143	2858286
Proporsi (%)	19,40	38,15	57,54	42,46	100,00	

Sumber : Data primer, diolah

KESIMPULAN

1. Secara umum selama dua tahun pengamatan (2001-2002), terjadi kecenderungan penurunan harga komoditas pertanian, sedangkan harga sarana produksi dan upah pertanian cenderung meningkat.
2. Dalam kurun waktu 1999-2002, secara umum telah terjadi kenaikan PDRB dengan laju pertumbuhan rata-rata 13,83 persen pertahun. Pertumbuhan yang cepat terjadi pada sektor pertambangan (rata-rata 190,39 %/tahun).
3. Pada tahun 1998, sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar dalam PDRB Propinsi NTB. Sejak tahun 2000 peranan sektor pertanian sebagai menyumbang PDRB terbesar digantikan oleh sektor pertambangan.
4. Produksi gabah Propinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2002 mencapai 1370 ribu ton yang dihasilkan dari 311 ribu Ha luas areal panen.

5. Secara umum ketahanan pangan wilayah Nusa Tenggara Barat dilihat dari ketersediaan beras, cukup tinggi.
6. NTP bulanan tahun 2002 dari bulan Januari-Desember dibawah 100 dengan kisaran antara 83-92.
7. Pendapatan rumahtangga petani berbagai komoditas sangat bervariasi. Rata-rata pendapatan per kapita sebulan sebesar Rp 551110, jauh di atas batas kemiskinan BPS.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS NTB. 2003. Statistik Harga Produsen dan Nilai Tukar Petani Propinsi NTB 2002. Badan Pusat Statistik Propinsi NTB. Mataram.
- BPS. 2003. Produk Domestik Regional Bruto Propinsi di Indonesia 1999-2002. Badan Pusat Statistik. Jakarta
- BUKPD NTB. 2002. Analisa Ketersediaan Pangan NTB 2003. Badan Urusan Ketahanan Pangan NTB. Mataram.
- Erwidodo, M. Syukur, B. Rachman, dan G.S. Hardono. 1993. Evaluasi Perkembangan Tingkat Upah di Sektor Pertanian. Monograph Series no. 15. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.

TRANSFORMASI SOSIO BUDAYA DALAM PEMBANGUNAN PEDESAAN DI LAHAN MARGINAL

Hasil Pengamatan Pada Proyek Bangun Nusa Di Nusatenggara Barat

Endang Lestari Hastuti, Tri Pranaji¹⁾ dan Kukuh Wahyu W²⁾

¹⁾ Ajun Peneliti Madya dan Ahli Peneliti Utama pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian Bogor.

²⁾ Penyuluh Pertanian Muda pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi NTB.

ABSTRAK

Transformasi pertanian atau agribisnis di pedesaan dapat diartikan sebagai perubahan bentuk, ciri, struktur, dan kemampuan sistem kegiatan pertanian dalam menggairahkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan menyehatkan perekonomian masyarakat pedesaan. Makalah merupakan hasil penelitian di dua desa di Kabupaten Lombok Timur, dengan menggunakan metoda kuantitatif dan kualitatif. Penelitian bertujuan untuk membuat alternatif rumusan model perekayasaan sosio-budaya di pedesaan, khususnya di lahan marginal. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sumberdaya lahan masih menjadi salah satu kendala besar bagi pengembangan perekonomian pedesaan. Oleh karena itu perekayasaan sosio-budaya untuk mempercepat transformasi masyarakat pedesaan harus disertai dengan reformasi agraria, pembenahan sistem pengorganisasian, manajemen sistem usaha dan agribisnis, pengembangan tata nilai yang mendukung ke arah kemajuan, pembentukan struktur masyarakat pedesaan yang lebih diferentiatif, dan perencanaan jangka panjang yang bersifat *multy years planning*.

Kata Kunci : *transformasi, sosio-budaya, pembangunan, agribisnis.*

PENDAHULUAN

Makalah ini merupakan hasil pengamatan lapangan di dua desa di pedesaan Nusa Tenggara Barat, yang dipilih secara purposif. Tujuan penulisan makalah adalah dalam rangka membuat alternatif rumusan model perekayasaan sosio-budaya setempat, dalam mempercepat transformasi perekonomian masyarakat pedesaan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Terdapat semacam anggapan yang meluas bahwa tidak majunya masyarakat pedesaan disebabkan oleh kematian budayanya. Ini semua terjadi terutama disebabkan oleh ketidaktepatan pendekatan pembangunan pertanian yang digunakan selama ini dan sebelumnya. Mungkin karena ingin segera dapat menunjukkan prestasi kemajuan di bidang ekonomi pada masyarakat, pemerintah telah menempuh strategi pembangunan yang lebih menonjolkan pertumbuhan ekonomi. Strategi ini sekaligus berimplikasi sangat buruk terhadap khasanah sosio budaya, termasuk sumberdaya manusia di pedesaan. Selain itu, penajaman strategi yang dibarengi dengan pemusatan kekuasaan ke atas atau pada kepala pemerintahan secara vertikal juga dapat menimbulkan kehancuran khasanah demokrasi di pedesaan. Karena itu pula kontrol terhadap pengurusan dan pengruskaan sumberdaya alam dan lingkungan pedesaan menjadi sangat lemah, dan saat ini kondisi sumberdaya alam dan lingkungan pedesaan sudah pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan.

Kondisi ekonomi masyarakat pedesaan yang umumnya masih mengandalkan pada kegiatan pertanian sebagai tulang punggung, dewasa ini dapat dikatakan semakin menyedihkan. Jika gambaran ini pemerintah tidak segera menindaklanjuti dengan langkah-langkah yang strategis dan terencana dengan baik, diperkirakan dalam jangka waktu satu atau dua dekade mendatang, keseluruhan perekonomian masyarakat pertanian dan pedesaan di Indonesia yang diidealkan berbasis kerakyatan, akan mengalami kemunduran yang semakin parah. Ada beberapa faktor yang dapat menjelaskan hal itu, antara lain daya dukung tanah dan sumberdaya lainnya yang semakin menurun, prasaarana dan kelembagaan ekonomi yang terbelakan, sumberdaya manusia yang tidak tergarap dengan baik, tata nilai yang belum sepenuhnya mencerminkan daya saing yang dapat diandalkan, dan organisasi petani yang tidak berkembang sehat.

METODOLOGI PENELITIAN

Kerangka Pemikiran

Kata transformasi diambil dari kata transformation. Istilah transform (Neufebet dan Guralnik, 1988) dapat diartikan sebagai perubahan, dan transformation dapat diartikan sebagai proses perubahan. Transformasi dapat diartikan sebagai proses perubahan, yang mencakup perubahan bentuk, ciri, struktur dan kemampuan sistem kegiatan pertanian dalam menggairahkan, menumbuhkan dan mengembangkan, dan menyehatkan perekonomian masyarakat pedesaan. Dalam pengertian yang lebih luas, dikaitkan dengan perekayasaan sosio-budaya pedesaan, transformasi masyarakat pedesaan dapat dipandang sebagai proses modernisasi atau pembangunan (Pranaji, 1999) pedesaan.

Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi contoh dilakukan secara purposif, yaitu didasarkan pada lokasi yang pernah terkena proyek pengembangan desa atau pertanian, yang bersifat integratif dan berlangsung lama sekitar sepuluh tahun lebih. Propinsi Nusa Tenggara Barat mewakili kawasan beriklim relatif kering, yang pernah diselenggarakan proyek pengembangan pertanian untuk Nusa Tenggara, dan beragroekosistem lahan kering. Penelitian dilakukan di Desa Labuhan Lombok dan Bagik Papan, di Kabupaten Lombok Timur.

Pengumpulan Data, Unit Pengamatan, dan Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dan dianalisa adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan tertutup, daftar pertanyaan semi terbuka, dan dilengkapi dengan pengamatan langsung di lapangan.

Unit yang dijadikan sebagai obyek pengamatan mencakup pelaku-pelaku sosial diantaranya petani, pedagang, pengolah, pengrajin, aparat pemerintah, buruh tani, tukang, pemuka masyarakat, pengurus lembaga ekonomi, dan orang-orang/key informan yang menguasai permasalahan setempat.

Data primer dikumpulkan dari hasil wawancara dengan petani, pedagang, pengolah hasil pertanian, Pengurus Koperasi/KUD, BRI, dan lembaga perekonomian lain. Sementara data sekunder dikumpulkan melalui survey lapangan antara lain dari lembaga pemerintah, LSM, BUMN, dan swasta.

Pengolahan data langsung dimulai begitu data terkumpul, dengan melakukan sistimatisasi catatan harian. Selain itu untuk penganalisaan yang menggunakan angka atau simbol, pengolahannya diupayakan menggunakan bantuan komputer dan tenaga pengolah data.

PEREKAYASAAN SOSIO-BUDAYA PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

Sejak tahun 1986/1987 di Propinsi Nusa Tenggara Barat telah dilakukan program pembangunan yang relatif khas, yaitu Program/Proyek Bangun Nusa atau NTASP (*Nusa Tenggara Agricultural Support Project*). Program ini merupakan program pengembangan pertanian terpadu yang menitik beratkan kegiatannya pada peningkatan pelayanan untuk peningkatan produksi pertanian di pedesaan. Kegiatan dari program ini mirip atau bahkan menjadi kegiatan proyek pemerintah pusat yang dijalankan di daerah, dengan mekanisme pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sumber dana adalah bantuan luar negeri atau loan Bank Dunia. Karena dinilai cukup berhasil, program ini dilanjutkan dengan Proyek NTAADP (*Nusa Tenggara Agricultural Area Development Project*) yang lebih menekankan pada pengembangan wilayah. Dalam kaitannya dengan program ini ternyata dapat memberikan dampak yang relatif positif bagi masyarakat petani setempat, terutama dalam perbaikan mutu lahan, peningkatan taraf hidup petani dari segi pendapatan dan penghematan tenaga kerja serta input tunai dalam penggunaan air, benih unggul dan obat-obatan (Pranaji, 2000).

Sebagai gambaran persepsi responden (masyarakat tani) terhadap pelaksanaan program-program pertanian di desa penelitian di Kabupaten Lombok Timur sebagai berikut,

Tabel 1. Persepsi Responden Terhadap Manfaat Program Pembangunan Pertanian, di Dua Desa Penelitian di Kabupaten Lombok Timur, Tahun 2000

Uraian	Desa Labuhan Lombok %	Desa Bagik Papan %
1.perbaikan mutu lahan	57	3
2.perbaikan pendapatan petani	65	3
3.menghemat tenaga kerja	43	3
4.menghemat input usahatani	58	3
5.perubahan bentuk lahan	55	2
6.program sertifikasi	35	-
7.peningkatan ketersediaan air	47	17
8.memperbaiki taraf hidup	73	20
9.perbaikan usahatani	43	20

Sumber : Pranaji, 2000. Hal 157

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa program pembangunan pertanian relatif lebih berhasil di desa Labuhan Lombok dibanding Desa Bagik Papan. Di Desa Bagik Papan, program pertanian hanya dapat memperbaiki taraf hidup dan usahatani, meskipun relatif kecil.

TANAH DAN DAYA DUKUNG SETEMPAT

Sumberdaya tanah mencakup air masih menjadi andalan kehidupan masyarakat pedesaan setempat. Perhatian pemerintah terhadap faktor tanah secara fisik masih lebih banyak dibanding dari segi sosial ekonomi. Gejala kelangkaan tanah tampaknya telah lama menjadi masalah serius bagi kehidupan masyarakat atau perekonomian pedesaan. Tekanan perhatian pemerintah setempat atas tanah pada umumnya masih menekankan bagaimana meningkatkan produktivitas tanah melalui introduksi teknologi pertanian. Penataan hukum atas tanah dilihat dari kepentingan masyarakat pedesaan belum menunjukkan gambaran yang baik. Program sertifikasi lahan dilakukan secara sepihak dan tidak dososialisasikan pada masyarakat pedesaan. Akibatnya banyak petani yang tidak menyadari bahwa tanah yang digarapnya hanya sekedar “numpang lewat”. Setelah tanah dapat digarap dengan baik, justru banyak petani yang terusir dari tanah garapannya. Suatu gambaran yang buruk bahwa banyak petani di Nusatenggara Barat tidak mempunyai tanah, dan sebaliknya banyak bukan petani yang menguasai tanah di pedesaan. Dilihat dari kepentingan peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat pedesaan, tampaknya strategi perekayasaan sosio-budaya pedesaan yang didekati dari segi penataan fisik tanah, belum menunjukkan gejala perbaikan yang berarti.

Daya dukung kehidupan masyarakat pedesaan masih bertumpu pada tanah pertanian. Secara fisik daya dukung di Nusa Tenggara Barat relatif masih rendah. Jika dilihat dari aspek kelembagaan atas tanah pertanian, maka daya dukung masyarakat pedesaan dalam beberapa tahun mendatang diperkirakan akan menunjukkan gejala penurunan yang sangat berarti. Maka program sertifikasi saja tidak terlalu dapat diharapkan dapat mengangkat fungsi lahan sebagai faktor peningkatan kesejahteraan petani atau masyarakat pedesaan.

PRASARANA DAN KELEMBAGAAN EKONOMI

Pada umumnya pembangunan pertanian di pedesaan masih banyak menekankan pada budaya material, atau menekankan pada segi fisik. Pembangunan prasaran ekonomi di Nusa Tenggara Barat telah menunjukkan kemajuan yang cukup berarti, seperti bangunan jalan dan jembatan. Bangunan prasarana yang cukup menonjol adalah bangunan jaringan irigasi dengan pompa sumur air dalam.

Keberadaan prasaran jalan dan jembatan sangat membantu masyarakat pedesaan, karena mereka menjadi lebih mudah melakukan mobilitas horisontal terutama yang berkaitan dengan memperoleh input dan menjual produk pertanian.

Kelembagaan pendukung usaha pertanian seperti BRI Unit Kecamatan atau Bank Perkreditan Rakyat yang melayani kepentingan masyarakat pedesaan meskipun telah tersedia, namun fungsi pelayanannya masih sulit dijangkau oleh masyarakat petani, terutama golongan berlahan sempit. Terdapat kecenderungan bahwa lembaga perkreditan formal relatif lebih dapat diakses oleh pedagang output, pedagang input, dan petani berlahan luas. Sedang masyarakat petani berlahan sempit hanya dapat mengakses lembaga perkreditan non formal seperti pelepas uang, pedagang output, pedagang input dan sebagainya. Hal ini disebabkan karena prosedur peminjaman relatif lebih cepat dan sederhana, tanpa harus menjaminkan tanah sebagai agunan (Hastuti, 2004). Perlu ditegaskan bahwa kekuatan pelayanan lembaga jasa permodalan untuk pertanian lahan kering relatif sangat lemah, terutama jika komoditas andalan yang diusahakan kurang diarahkan pada permintaan pasar yang tinggi.

Lembaga pemasaran yang memberikan pelayanan bersaing baru dapat dirasakan di tingkat kabupaten. Bagi pengembangan pertanian setempat, antara desa dan antar kecamatan seakan-akan merupakan ruang vakum yang sulit dijangkau lembaga pemasaran modern. Titik kritis masalah pemasaran hasil pertanian terletak antara lembaga tingkat desa dan atau kecamatan. Dalam kondisi demikian potensi nilai tambah hasil pertanian yang tidak dapat dinikmati petani setempat menjadi sangat tinggi. Harga produk pertanian yang tinggi di tingkat konsumen, tidak menjadi jaminan bahwa penerimaan harga di tingkat petani menggembirakan.

Lembaga koperasi seperti KUD, tidak menggambarkan hal yang buruk. Namun jika keberadaannya dan fungsi lembaga ini dikaitkan dengan pengembangan usaha pertanian di pedesaan di pedesaan, maka gambarannya sangat menyedihkan. Kegiatan simpan pinjam, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian banyak dijadikan kegiatan utama, namun sayangnya lembaga ini jarang yang berhubungan langsung dengan petani. Fungsinya justru lebih banyak sebagai kepanjangan tangan pedagang besar.

Lembaga alih teknologi di tingkat desa seperti penyuluhan pertanian relatif masih lemah, karena tekanan perhatian lembaga ini masih terlalu banyak pada aspek produksi pertanian yang berupa bahan mentah atau produk pertanian olahan yang bernilai tambah rendah. Tampaknya dengan pergeseran peradaban ekonomi pedesaan ke arah yang lebih komersial, keberadaan lembaga ini perlu disesuaikan dengan pengembangan bisnis pedesaan atau agribisnis berciri industrial. Penyuluh pertanian harus mampu mengubah cara atau pendekatan ke petani. Di masa mendatang, kegiatan penyuluhan pertanian tidak dapat lagi hanya menggunakan pendekatan sekaton produksi. Orientasi kegiatan penyuluhan adalah menghasilkan produk pertanian yang berdaya saing tinggi di pasaran.

Posisi terhormat atau tidaknya lembaga penyuluhan pertanian di tingkat desa akan ditentukan oleh seberapa jauh mereka dapat melayani kebutuhan petani untuk meningkatkan kinerja kegiatan ekonomi yang berbasis sumberdaya pertanian setempat. Terlebih-lebih sekarang ini PPL merasa tidak mempunyai tempat berpijak yang nyaman untuk dapat berperan secara optimal di pedesaan.

KEHIDUPAN PETANI YANG SEMAKIN TERJEPIT

Kasus di Nusa Tenggara Barat menunjukkan bahwa daya dukung lahan pertanian setempat hampir tidak memungkinkan dapat menopang ekonomi pedesaan yang lebih maju. Kehidupan ekonomi petani di pedesaan semakin terjepit. Dengan lahan serba terbatas dan produk andalan yang bernilai tambah relatif rendah, sulit mengharap perekonomian di pedesaan setempat dapat dipacu lebih tinggi lagi. Peningkatan investasi untuk usaha pertanian hanya mungkin dilakukan di bagian atau sub-sistem pengolahan dan pemasaran hasil. Hanya sayangnya kegiatan ini biasanya dikuasai oleh pelaku-pelaku ekonomi di luar desa. Oleh sebab itu tanpa adanya perubahan strategi yang mengarah pada peningkatan nilai tambah produk pertanian di pedesaan, maka investasi pertanian di pedesaan tidak akan rasional. Selama kondisi seperti saat ini, kemajuan perekonomian pedesaan akan sulit dipacu lebih cepat lagi.

Orientasi masyarakat pedesaan tampaknya tidak akan memacu usaha pertanian setempat. Kondisi di Nusa Tenggara Barat menunjukkan gejala kemacetan perkembangan usaha pertanian. Sulit mengharapkan pelaku ekonomi di pedesaan walaupun dari kalangan muda, dapat berkompetisi pada tingkat tinggi di perkotaan, mereka umumnya berbekal tingkat pendidikan formal setingkat sekolah lanjutan, bahkan banyak yang hanya tamatan Sekolah Dasar. Bekal pendidikan non-formal menjadi

faktor dominan yang menggerakkan perekonomian pedesaan. Pertanian di pedesaan akhirnya mereka tinggalkan dan diurus oleh orang-orang yang berusia lanjut. Hal ini disebabkan karena kegiatan pertanian memang sudah sulit untuk ditingkatkan kinerja ekonominya. Agar secara ekonomi mereka tetap dapat bertahan hidup, mereka menjual jasa ketrampilan kerja yang serba pas-pasan yang mereka miliki ke luar desa. Kasus dari Desa Bagik Papan banyak dari golongan pekerja muda yang memilih menjadi TKI di luar negeri.

TATA NILAI DAN DINAMIKA EKONOMI SETEMPAT

Masyarakat di pedesaan Nusa Tenggara Barat tampaknya tidak mempunyai harapan terlalu besar terhadap kemajuan kegiatan di sektor pertanian. Tekanan alam yang berat terutama dari segi ketersediaan air dan kesuburan tanah, cukup memaksa masyarakat pedesaan setempat mencari sumber mata pencaharian di luar pulau. Tekanan alam tadi pada akhirnya juga menjadi tekanan ekonomi yang berat bagi masyarakat pedesaan setempat. Sebagai respon yang wajar, masyarakat pedesaan tidak merasa harus bertahan di desa. Mereka juga tidak enggan untuk bekerja di luar negeri sebagai TKI. Tata nilai yang dinilai kurang sesuai untuk kemajuan di Nusa Tenggara Barat adalah kurangnya rasa malu, kerja kurang keras dan rajin, daya empati yang rendah, dan kurang terorganisir. Tampaknya sulit mengharap sektor pertanian di Nusa Tenggara Barat mampu menampung perubahan tata nilai ke arah yang lebih kompetitif. Tampaknya terdapat hubungan yang erat antara tata nilai, sejarah perkembangan perekonomian masyarakat pedesaan setempat dan daya dukung agroekosistem setempat.

ORGANISASI PETANI DAN TRANSFORMASI EKONOMI

Gejala yang cukup menarik untuk dikemukakan bahwa saat ini hampir tidak ada organisasi yang tumbuh dari bawah, seperti lembaga perkreditan desa, koperasi desa atau lumbung padukuhan yang dapat mengembangkan diri dengan baik. Begitu juga dengan organisasi ekonomi petani yang dibentuk dari atas, hampir tidak ada yang bertahan hidup dengan tingkat daya saing tinggi. Kekuatan organisasi petani yang ada di pedesaan tampaknya tidak cukup tenaga untuk menggerakkan dinamika perekonomian pertanian pedesaan. Jika dibuat kesimpulan hampir semua organisasi petani di pedesaan kondisinya relatif rapuh. Kerapuhan ini diperkirakan menjadi salah satu sebab penting mengapa kehidupan dan perekonomian masyarakat pedesaan cenderung terbelakang.

Organisasi petani yang selama ini banyak dihidupkan dari atas mirip sebagai organisasi penerahan masa. Dalam banyak kasus organisasi petani kelihatan hidup terutama jika keberadaan organisasi itu masih diperlukan pemerintah untuk melancarkan program atau proyek jangka pendek. Namun sebenarnya jika dilihat dari sudut bahwa organisasi itu adalah sebuah sarana peningkatan daya saing masyarakat pedesaan setempat secara berkelanjutan, ternyata masih sangat jauh seperti yang diharapkan. Hal ini antara lain disebabkan karena para petani yang menjai anggotanya, tidak merasa peduli dengan segala macam aturan yang tidak dimengerti. Petani tidak mau mengerti karena merasa tidak mendapat manfaat apapun atas dibentuknya organisasi tersebut. Bahkan seringkali terjadi nama petani dipakai tanpa minta ijin untuk mensukseskan sebuah proyek. Seringkali petani tidak atau sangat jarang diajak untuk melakukan proses akuntabilitas penyelenggaraan organisasi yang di dalamnya namanya dicantumkan. Selain itu seringkali manajemen organisasi petani seperti KUD tidak transparan, dan cara pengambilan keputusan hanya dilakukan oleh elit pengurus tertentu.

Dilihat dari keutuhan sistem agribisnis, pembentukan organisasi petani cenderung mengikuti pola bersekat yang rentan terhadap gangguan alam, harga, dan persaingan bisnis yang ketat. Sekatan organisasi yang menghasilkan nilai tambah paling rendah adalah organisasi produksi bahan baku, yang umumnya dilakukan petani. Sistem keorganisasian petani yang tidak utuh menyebabkan tidak efisien. Bahkan titik lemah dari bangunan organisasi petani justru terletak pada organisasi produksi bahan bakunya. Keadaan ini menjadi sangat berbahaya, karena runtuhnya sekatan organisasi produksi bahan baku akan menghancurkan sekatan organisasi lainnya. Seefisien apapun organisasi di atas sekatan organisasi bahan baku, tidak akan banyak gunanya jika sistem sekatan organisasi produksi tidak sehat.

Selain itu sistem keorganisasian agribisnis dan kegiatan usaha ekonomi lainnya di pedesaan, kebanyakan tidak didasarkan atas pembentukan interdependensi yang relatif simetris di antara para anggotanya. Akibatnya dalam keorganisasian usaha yang demikian, akan mudah terjadi konsentrasi kapital pada beberapa atau satu orang pelaku ekonomi di pedesaan. Jika kondisi ini benar-benar terjadi dan tidak ada sistem kontrol moral yang kuat dari budaya masyarakat setempat, maka akan mudah terjadi proses penimpangan sosial yang mengarah pada inefisiensi dan kerentanan sistem perekonomian di pedesaan. Sistem ini mudah terjadi pada keorganisasian ekonomi setempat yang menganut pola patron- klient dan juga mengikuti pola ekonomi pasar.

Transformasi perekonomian pedesaan dari yang semula mencirikan gambaran masyarakat pertanian tradisional-subsisten menjadi ke arah gambaran masyarakat pertanian maju-industrial, tampaknya tidak sepenuhnya dapat berjalan mulus. Struktur dan organisasi ekonomi masyarakat desa yang menggerakkan proses transformasi, tampaknya belum cukup handal dan kuat untuk menopang proses transformasi masyarakat pertanian di pedesaan. Perkembangan perekonomian pedesaan banyak ditentukan oleh organisasi ekonomi dan kekuatan pelaku ekonomi di luar desa. Organisasi ekonomi masyarakat perkotaan yang sarat dengan ciri komersial berbasis industri dan jasa, dan didukung oleh sistem kelembagaan formal yang relatif kuat, menjadi penggerak dan pengatur perkembangan ekonomi pedesaan. Akibatnya dalam berhadapan dengan modernisasi dan globalisasi pasar, posisi ekonomi masyarakat pedesaan menjadi relatif lemah.

KESIMPULAN DAN RANCANGAN KEBIJAKSANAAN

Berdasarkan penemuan hasil penelitian terhadap Program Perkayasaan yang telah dilakukan di dua desa di lahan marginal di Propinsi Nusa Tenggara Barat, dapat disumbangkan rancangan kebijaksanaan untuk percepatan transformasi masyarakat pedesaan ke arah yang lebih sehat dan berkelanjutan sebagai berikut :

1. Percepatan transformasi masyarakat pedesaan merupakan keperluan yang mendesak, terutama dikaitkan untuk mengejar ketertinggalan masyarakat pedesaan. Perkayasaan sosio-budaya yang dilakukan untuk itu harus disertai dengan pendekatan penyelenggaraan pembangunan yang bersifat desentralistik, dimana kekhasan setiap daerah dapat dijadikan dasar untuk menentukan pola pembangunan masyarakat pedesaan yang bersifat khas pula. Dengan pendekatan ini, keleluasaan masyarakat pedesaan untuk menentukan program pembangunan yang akan dijalankan menjadi lebih terbuka. Kreativitas masyarakat setempat dapat dijadikan penggerak utama percepatan transformasi perekonomian pedesaan.
2. Sumberdaya lahan masih menjadi salah satu kendala besar bagi pengembangan perekonomian pedesaan. Kegiatan usaha pertanian masih menjadi andalan perekonomian rumah tangga di pedesaan. Oleh karena itu perkayasaan sosio-budaya untuk mempercepat transformasi masyarakat pedesaan harus dibarengi dengan melakukan reformasi keagrariaan di pedesaan yang lebih terarah. Demikian pula pengembangan organisasi petani, seyogyanya dibarengi juga dengan konsolidasi lahan di pedesaan. Kegagalan dalam melakukan reforma agraria akan dapat menjadikan perkembangan masyarakat pedesaan kehilangan pijakan atau basis usaha yang jelas.
3. Keorganisasian petani dan agribisnis di pedesaan masih tersekat-sekat dan menjadikan sistem ekonomi dan agribisnis tidak sehat dan berdaya saing rendah. Perkayasaan keorganisasian petani dan agribisnis pedesaan perlu diarahkan untuk menghasilkan produk pertanian akhir yang bernilai tambah tinggi. Sistem pengorganisasian petani dan agribisnis secara integratif perlu dipertimbangkan sebagai langkah strategis untuk peningkatan daya saing masyarakat pertanian di pedesaan. Keorganisasian usaha tadi perlu didasarkan atas kepemilikan secara kolektif oleh masyarakat pedesaan. Jaringan kemitraan usaha yang dikembangkan haruslah didasarkan pada interdependensi yang simetris antar pelaku agribisnis.
4. Sistem manajemen yang digunakan dalam pengorganisasian sistem usaha dan agribisnis di pedesaan, haruslah menggunakan kaidah pertanggungjawaban yang jelas, keterbukaan manajemen, pengambilan keputusan yang bersifat partisipatif, dan demokratis. Dengan cara yang demikian kepentingan anggota organisasi perekonomian di pedesaan dapat terakomodasi dengan baik, dan dapat memberikan pelayanan yang memuaskan kepada anggota. Kesalahan di dalam manajemen akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan anggota terhadap berbagai program perkayasaan pembangunan di pedesaan.

5. Tata nilai yang dikembangkan dalam perekonomian pedesaan harus dapat mendukung ke arah kemajuan dan ketinggian daya saing masyarakat pedesaan. Seperangkat tata nilai yang sesuai untuk itu adalah kerja keras, rajin, pola hidup hemat, produktif, rasa malu, punya harga diri, motif berprestasi atau kompetitif, tidak resisten terhadap inovasi, budaya empati tinggi, kerjasama yang terorganisir dan sistematis, cara berfikir yang rasional dan impersonal, bervisi jangka panjang dan adanya kepemimpinan yang diandalkan. Sosialisasi terhadap seperangkat tata nilai tersebut harus menjadi bagian dari pengembangan budaya usaha masyarakat dan sumberdaya manusia pedesaan setempat. Pelembagaan tata nilai dapat dilakukan melalui lembaga keluarga, atau kelembagaan yang tumbuh dengan baik dan sehat di dalam masyarakat.
6. Di masa datang perlu dipikirkan tentang terbentuknya struktur masyarakat pedesaan yang lebih diferensiatif dan jauh dari kesan masyarakat yang polaristik. Struktur masyarakat yang demikian tadi perlu dibarengi dengan pengembangan kemampuan sumberdaya manusia pedesaan yang mempunyai ketrampilan dan etos kerja yang dapat diandalkan. Dengan gambaran ideal demikian ini para perancang kebijakan tingkat makro (nasional) harus mampu merumuskan langkah-langkah strategis ke arah itu, dan tidak terjebak dalam perencanaan yang bersifat *yearly planning*. Perencanaan tani harus bervisi jangka panjang dan bersifat *multy years planning*.
7. Dalam rangka lebih mempertajam pencapaian program pembangunan pedesaan di masa datang, dukungan pengetahuan tentang kekuatan sosio-budaya lokal sangat penting. Oleh sebab itu sekaligus dalam rangka mempertajam dan memperoleh pengkayaan pengetahuan, dan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi pembangunan pertanian dan pedesaan di masa mendatang, kegiatan penelitian atau studi sosial ekonomi perlu lebih memperhatikan aspek sosio-budaya lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Neufeldt, V and D.B.Guralnik. 1988. *Webster's New Woprlrd Dictionary of American English*. Webter's new World. New York.
- Pranaji, T. 1999. *Perekayasaan Sosio Budaya Dalam Percepatan Transformasi Masyarakat Pedesaan Secara Berkelanjutan*. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor. Proposal penelitian.
- Pranaji, T. 2000. *Strategi pengembangan Kelembagaan Agribisnis (Pengolahan hasil) Perikanan*. Makalah Seminar Sehari "Pemberdayaan Industri Pengolahan Ikan di Indonesia". Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan. 2 Agustus 2000. Jakarta.
- Pranaji, T, S. Wahyuni, E.L. Hastuti, J. Situmorang, A. Setyanto, dan C. Muslim. 2000. *Perekayasaan Sosio-Budaya dalam Percepatan Transformasi Masyarakat Pedesaan*. Laporan Hasil Penelitian. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Hastuti, E. L. 2004. *Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Kelembagaan Pembiayaan Pertanian di Pedesaan*. Dipersiapkan untuk diterbitkan pada Icaserd Working Paper. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan pengembangan pertanian. Departemen Pertanian.